



PENDAPAT

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



ATAS

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN
TAHUN ANGGARAN 2022**

JAKARTA, 24 AGUSTUS 2023



**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Disampaikan Oleh : I WAYAN SUDIRTA, S.H.
Anggota Nomor : A-233

**Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita semua
Om Swastiastu
Namo Budhaya
Salam Kebajikan
M E R D E K A !!!**

Yang Terhormat Ketua dan Pimpinan DPR RI,

Yang Terhormat Anggota DPR RI,

Yang Terhormat saudari Menteri keuangan yang mewakili Pemerintah, beserta jajarannya

Yang terhormat rekan-rekan Anggota Dewan dan hadirin yang dimuliakan

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua, sehingga dapat melaksanakan tugas konstitusional untuk memberikan Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022.

Tahun 2022 adalah tahun ke-tiga sejak terjadinya Pandemi Covid-19; Kebijakan Fiskal diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional, serta Perlindungan Sosial.

Realisasi APBN Tahun Anggaran 2022, secara umum, adalah sebagai berikut:

- Realisasi Pendapatan Negara mencapai 114,05%

- Pendapatan Negara meningkat yang di topang dengan pencapaian tax rasio 10,39% pada tahun 2022; Capaian tax rasio ini merupakan yang terbaik dalam 7 tahun terakhir. **Fraksi PDI Perjuangan** memberikan apresiasi atas pencapaian tax rasio tersebut.
- Realisasi Belanja Negara mencapai 99,67%
- Defisit Anggaran mencapai 54,8% dari yang direncanakan, sehingga defisit berada pada besaran 2,35% PDB; yang memperlihatkan bahwa konsolidasi fiskal telah terlaksana satu tahun lebih cepat dari yang diamanatkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2020.

Capaian ini memperlihatkan APBN Tahun Anggaran 2022, berada dalam desain Fiskal dan Postur APBN yang sesuai dengan ketentuan.

Yang Terhormat Ketua, Pimpinan, dan Anggota DPR RI,

Yang Terhormat saudari Menteri keuangan beserta jajarannya

BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022 dan memberikan opini bahwa **Laporan Keuangan tersebut telah menyajikan secara wajar** atau WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. **Fraksi PDI Perjuangan** memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah memperoleh opini WTP pada LKPP Tahun anggaran 2022.

BPK juga telah menyampaikan temuan 16 permasalahan terkait dengan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan beserta rekomendasi yang wajib ditindak lanjuti oleh Pemerintah.

Atas temuan-temuan permasalahan tersebut, **Fraksi PDI Perjuangan** berpendapat Pemerintah harus segera menindak lanjuti temuan-temuan permasalahan tersebut, memastikan penyelesaiannya, mengambil tindakan penegakan hukum yang diperlukan dan memastikan agar tidak terjadi kembali pada APBN Tahun Anggaran berikutnya.

Yang Terhormat Ketua, Pimpinan, dan Anggota DPR RI,

Yang Terhormat saudari Menteri keuangan beserta jajarannya

Pemeriksaan **BPK** adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam hal penyajian material, khususnya dalam memenuhi **Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.**

Pengelolaan APBN, selain harus memenuhi hal tersebut diatas, juga diamanatkan oleh Konstitusi dan Undang-Undang, bahwa **APBN memberikan sebesar-**

besarnya kemakmuran rakyat, yang dikelola secara efektif, efisien, mencapai prestasi kerja serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa Pemerintah, dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN tahun 2022, juga harus menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Kebijakan sektoral** pada Kementerian/Lembaga Pemerintah yang telah ikut mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022; Hal ini sebagai akuntabilitas atas kinerja belanja pemerintah pusat dalam meningkatkan perekonomian nasional.
2. **Dampak inflasi** yang lebih tinggi pada daya beli masyarakat dan kesejahteraan rakyat
3. **Dampak kenaikan tingkat suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun** pada beban keuangan negara
4. **Dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar** pada beban keuangan negara
5. **Dampak kenaikan ICP, rendahnya Lifting Minyak dan Gas** pada beban keuangan negara
6. **Penerima manfaat Insentif Perpajakan** yang mendorong perekonomian Indonesia, yaitu menjelaskan bahwa insentif perpajakan berkontribusi bagi perekonomian Indonesia, yang ditunjukkan dengan indikator-indikator tertentu.
7. **Kebijakan Belanja Negara tahun 2022**, antara lain adalah penguatan *spending better*. Pemerintah harus menjelaskan **capaian *spending better* belanja negara** yang ditunjukkan dengan belanja prioritas yang efektif dan efisiensi belanja nonprioritas.
8. Rasio utang terhadap PDB tahun 2021 sebesar 40,74%, kemudian pada tahun 2022 sebesar 39,7%; Bagaimana skenario Pemerintah dalam **menurunkan rasio utang** tersebut di tahun-tahun mendatang?
9. Laporan pelaksanaan APBN yang dapat menjelaskan **besaran anggaran yang diperuntukan langsung untuk rakyat** sebagai kelompok penerima manfaat: Berapa nilai total belanja negara tersebut? Apa saja manfaat yang dirasakan langsung oleh rakyat secara langsung?
10. Laporan pelaksanaan APBN yang dapat menjelaskan **efektifitas dan efisiensi pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat?**
11. Laporan yang dapat menjelaskan **prestasi kerja Kementerian/Lembaga Pemerintah** dalam pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2022

12. Laporan kemajuan kerja dalam menyelesaikan Major Project RKP Tahun 2022, yang ditunjukkan dengan nilai alokasi anggaran, realisasi anggaran, capaian pekerjaan project pada Kementerian terkait; Major Project tersebut antara lain: Kawasan industri dan smelter, Pembangunan Energi Terbarukan, IKN, Project di Wilayah Papua, Destinasi Wisata, Food Estate, Reformasi sistem Perlindungan sosial, dan Major Project lainnya.
13. Pemerintah juga berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja pengelolaan seluruh kekayaan negara yang dipisahkan. Khususnya Laporan Investasi PMN yang telah mencapai Rp 2.909 triliun pada tahun 2022. Laporan kinerja tersebut diperlukan untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan telah memenuhi amanat konstitusi, khususnya pasal 33 UUD NRI 1945.

Menjadi tugas konstitusional DPR RI, untuk menilai apakah APBN tahun Anggaran 2022 telah menjalankan amanat konstitusi dan Perundang-undangan..

Dengan pertimbangan, pendapat, pandangan dan catatan tersebut diatas, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan mekanisme.

Demikian pendapat dan pandangan Fraksi PDI Perjuangan.
Atas segala perhatian sidang dewan yang terhormat, kami ucapkan terima kasih.
Merdeka !!!

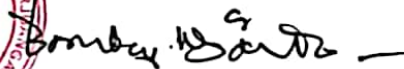
**Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Om Shanti Shanti Shanti Om
MERDEKA !!!**

Jakarta, 24 Agustus 2023

**PIMPINAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
Ketua, Sekretaris,



UTUT ADIANTO
Nomor Anggota A-194



BAMBANG WURYANTO
Nomor Anggota A-184



FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR RI

PANDANGAN

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**Dibacakan Oleh Bobby Adhityo Rizaldi, SE, Ak., MBA., CFE
Anggota DPR RI No A – 279
Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II**



JAKARTA, 24 AGUSTUS 2023



PANDANGAN

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Dibacakan Oleh : Bobby Adhityo Rizaldi, SE, Ak., MBA., CFE
Anggota DPR RI Nomor : A-279
Daerah Pemilihan : Sumatera Selatan II

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,**

**Yang Terhormat, Pimpinan Sidang Paripurna DPR RI,
Yang Terhormat, Menteri Keuangan beserta jajarannya,
dan hadirin yang kami hormati,**

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna hari ini, dalam rangka penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI atas keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami Fraksi Partai GOLKAR DPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Dalam momentum peringatan kemerdekaan ini, marilah kita kembali memperbarui semangat pengabdian kita dalam mewujudkan Indonesia yang semakin maju, sejahtera, adil dan makmur.

Pimpinan Sidang, dan Hadirin yang kami hormati,

Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh berkah bagi bangsa Indonesia. Masih segar dalam ingatan kita, pada tahun itu pandemi Covid-19 telah berangsur mereda. Kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang hampir tiga tahun lamanya terhambat oleh kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah berangsur kembali normal seperti sedia kala. Tradisi mudik lebaran kembali diizinkan untuk pertama kalinya sejak pandemi sehingga mengantarkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) kembali ke puncak dilevel 124,7. Dengan pulihnya konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 5,3%, atau lebih tinggi dari target 5,2%, sekaligus menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

Meski demikian, ekonomi Indonesia tahun 2022 bukannya tanpa ujian yang berat. Krisis geopolitik dengan pecahnya perang Rusia-Ukraina pada triwulan I, sempat menimbulkan lonjakan inflasi secara global, tak terkecuali di dalam negeri. Krisis geopolitik tersebut menambah dimensi ketidakpastian baru yang berpotensi bermuara pada krisis pangan, krisis energi, hingga krisis finansial. Melonjaknya harga komoditas energi sampai memaksa Pemerintah menaikkan harga BBM. Namun demikian, ditengah rentannya situasi global, Indonesia berhasil mengendalikan laju inflasi tahunan 2022 di angka 5,51%. Penerimaan negara juga mencatatkan capaian positif 116,3% dari target berkat *windfall profit* booming harga komoditas unggulan ekspor beserta produk-produk turunan dan hilirisasinya.

Kinerja ekonomi membanggakan Indonesia pada tahun 2022 tersebut berhasil menjadi fondasi yang kokoh bagi upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Hingga triwulan III 2023 saat ini, Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi diatas 5% dalam tujuh kuartal berturut-turut. Oleh karena itu, Fraksi Partai GOLKAR DPR RI, dengan penuh rasa syukur berpandangan bahwa Indonesia telah kembali dalam jalur menuju Indonesia Maju 2045.

Keberhasilan APBN 2022 menjawab berbagai tantangan mulai dari pandemi hingga krisis geopolitik tentunya layak mendapat apresiasi yang setinggi-tingginya. APBN 2022 layak kita jadikan sebagai referensi serta sebagai *best practice* dalam penanganan situasi krisis multidimensi baik dimasa kini maupun dimasa mendatang. Seperti kita ketahui bersama, dinamika geopolitik serta dampak-dampak dari pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir. Kita mesti senantiasa waspada mengantisipasi setiap skenario dan kemungkinan buruk yang ada.

Dalam kesempatan yang mulia ini, Fraksi Partai GOLKAR ingin mengingatkan bahwa jangan sampai keberhasilan kita menghadapi krisis dan ketidakpastian global hanya dapat dinikmati oleh generasi kita sendiri. Dengan ini, Fraksi Partai GOLKAR meminta agar Pemerintah dapat mendokumentasikan dengan baik setiap langkah, setiap kebijakan, serta setiap detil perkembangan penanganan situasi krisis termasuk pandemi Covid-19, agar dapat menjadi pegangan, referensi, serta literatur yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang.

Pimpinan Sidang, dan Hadirin yang kami hormati,

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. Ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pengelolaan APBN, setelah pada 2016 lalu untuk pertama kalinya LKPP mendapatkan opini WTP dalam kurun 12 tahun. Dalam hal ini, Fraksi Partai GOLKAR menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan segenap jajarannya karena mampu mempertahankan opini WTP dalam tujuh tahun berturut-turut. Capaian ini merupakan modal penting untuk mempertahankan optimisme dan kepercayaan publik bahwasanya Pemerintah memiliki kapasitas dan integritas dalam membawa bangsa ini menuju cita-cita menjadi negara maju pada tahun 2045.

LKPP tahun 2022 terdiri atas 81 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), dan 1 (satu) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), serta Laporan Keuangan BPK RI yang diaudit oleh kantor akuntan publik. Dari 81 LKKL, hanya terdapat 1 (satu) LKKL yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi karena pada tahun sebelumnya, terdapat 4 (empat) LKKL yang mendapat opini WDP.

Meski sudah cukup memuaskan, Fraksi Partai GOLKAR meminta Pemerintah agar senantiasa meningkatkan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan di setiap Kementerian/Lembaga, terlebih saat ini kita sudah memasuki tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024. Fraksi Partai GOLKAR juga berharap agar tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan keuangan yang tercermin dalam opini BPK dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga terkait dalam tahun anggaran berikutnya.

Pimpinan Sidang, dan Hadirin yang kami hormati,

Setelah mencermati Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun Anggaran 2022, Fraksi Partai GOLKAR berpandangan sebagai berikut:

1. Dari sisi Laporan Realisasi APBN

Fraksi Partai GOLKAR mengapresiasi realisasi penerimaan yang mencapai Rp2.635,8 triliun atau 116,3% dari target, sementara realisasi belanja tercatat Rp3.096,2 triliun atau 99,7% dari target. Hal ini mencerminkan APBN yang semakin sehat dan *sustainable* di tengah badai ketidakpastian global.

Namun disisi lain, terdapat *mismatch* yang cukup lebar dalam realisasi defisit dibanding pembiayaan. Realisasi defisit anggaran tercatat Rp460,4 triliun atau 54,8% dari target. Sedangkan realisasi pembiayaan tercatat Rp590,9 triliun atau 70,34% dari target. Kelebihan realisasi pembiayaan tersebut menghasilkan SiLPA senilai Rp130,5 triliun. Artinya, terdapat potensi inefisiensi pembiayaan dalam bentuk bunga atau *cost of financing* dari penarikan pembiayaan senilai Rp130,5 triliun. Dalam hal ini, Fraksi Partai GOLKAR meminta penjelasan lebih rinci mengenai pengelolaan pembiayaan tersebut.

2. Dari sisi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

SiLPA senilai Rp130,5 triliun menyebabkan penumpukan SAL akhir tahun 2022 mencapai Rp478,9 triliun, atau hampir menyentuh angka psikologis Rp500 triliun. Fraksi Partai GOLKAR memandang, *outstanding* SAL tersebut terbilang relatif sangat besar karena jika dibandingkan dengan APBN di waktu normal sebelum pandemi, dapat membiayai defisit satu tahun anggaran penuh.

Namun demikian, Fraksi Partai GOLKAR mengapresiasi langkah Pemerintah yang menggunakan SAL sebagai pembiayaan sebesar Rp143,9 triliun sepanjang 2022. Mengingat SAL merupakan salah satu instrumen pembiayaan non-utang, langkah ini tentu menghasilkan efisiensi yang signifikan dalam pengelolaan APBN 2022.

3. Dari sisi Neraca

Fraksi Partai GOLKAR dapat memahami adanya kenaikan kewajiban Pemerintah sehingga menyebabkan terjadinya penurunan ekuitas sebesar Rp511,4 triliun atau 13,05% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam hal ini, Fraksi Partai

GOLKAR meminta penjelasan lebih rinci terkait piutang tidak tertagih pada piutang jangka pendek yang jumlahnya mencapai Rp324,4 triliun atau 63,4% dari nilai penurunan ekuitas.

4. Dari sisi Catatan Atas Laporan Keuangan

Fraksi Partai GOLKAR mengapresiasi capaian-capaian pada realisasi Indeks Kesejahteraan Masyarakat APBN 2022 yang mencatatkan perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 5,86% atau turun dari 6,49% pada 2021. Jumlah penduduk miskin turun dari 9,71% pada 2021 menjadi 9,57%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 72,29 pada 2021 menjadi 72,91 pada 2022. Meskipun rasio gini tercatat stagnan diangka 0,381, namun secara keseluruhan pelaksanaan APBN 2022 telah cukup efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan beberapa pokok pikiran yang telah kami sampaikan, maka Fraksi Partai GOLKAR menyatakan “**Menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 untuk dibahas lebih lanjut.**” Demikian Pandangan Fraksi Partai GOLKAR, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan ridho-Nya kepada kita bersama dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Billahitaufiq Walhidayah.

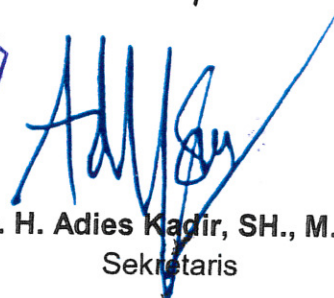
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 24 Agustus 2023

Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



H. Kahar Muzakir
Ketua



Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum.
Sekretaris



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



PANDANGAN
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPR RI
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Disampaikan oleh : Mohamad Hekal, MBA
Nomor Anggota : A - 103
Daerah Pemilihan : Jawa Tengah IX

Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu `alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat:

Pimpinan Rapat Paripurna dan Anggota DPR RI; Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Wakil Pemerintah; serta para hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menjalankan tugas negara sebagai penyambung lidah rakyat. Seraya kita memohon kiranya diberikan kemampuan dalam memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia Raya dan mewujudkan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fraksi Partai Gerindra DPR RI meyakini bahwa APBN menjadi wujud nyata hadirnya Negara dalam perekonomian, sehingga APBN harus menjadi instrumen strategis dan kebijakan ekonomi utama untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Konstitusi.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI, Wakil Pemerintah, serta hadirin yang berbahagia,



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara | Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



Fraksi Partai Gerindra DPR RI memberi apresiasi kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan Pemerintah. Apresiasi pertama kepada Pemerintah, karena LKPP 2022 kembali mendapatkan Opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" dari BPK RI.

Namun kita perlu ingat bahwa WTP bukanlah segalanya untuk menggambarkan kinerja Pemerintah. Selain aspek transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, K/L juga harus melihat secara detail dari penggunaan anggaran, terutama aspek efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran tersebut. Pemerintah tetap harus meningkatkan kinerja pengelolaan APBN, yang seharusnya berkontribusi positif pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, apresiasi juga disampaikan kepada BPK RI, yang pada tahun 2023 ini telah menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pelaksanaan APBN 2022 tepat waktu.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan temuan-temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat 16 temuan pemeriksaan BPK, yang perlu menjadi perhatian Pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Fraksi Partai Gerindra DPR RI juga mendorong Pemerintah agar berupaya lebih keras dalam rangka perbaikan Pelaporan keuangan K/L yang belum memenuhi Opini WTP, serta melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK RI. Pemerintah segera menindaklanjuti temuan-temuan tersebut, memastikan penyelesaiannya, mengambil tindakan hukum yang diperlukan, serta memastikan agar tidak terjadi kembali pada APBN tahun anggaran ke depan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI, Wakil Pemerintah, serta hadirin yang berbahagia,

Setelah mencermati Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun Anggaran 2022, Fraksi Partai Gerindra DPR RI berpandangan sebagai berikut:

Mengenai realisasi Pendapatan Negara, Belanja Negara, serta Defisit Anggaran 2022. **Pendapatan Negara** tercapai Rp2.635,8 triliun (116,31%) di atas target yang ditetapkan Perpres 98/2022 sebesar 2.266,2 triliun, atau meningkat 31,05% dibanding realisasi tahun sebelumnya.



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara | Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



Penerimaan Perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun. Meningkat dibanding realisasi tahun sebelumnya, yang hanya Rp1.547,8 triliun. Adapun Penerimaan PNBPN sebesar Rp595,6 triliun, meningkat sebesar Rp137,1 triliun dari realisasi 2021 yang hanya Rp458,5 triliun.

Sementara itu, PNBPN Kekayaan negara yang dipisahkan (KND) melalui penerimaan dividen BUMN mencapai Rp40,6 triliun. Meski meningkat dibanding realisasi tahun sebelumnya (Rp30,5 triliun). Angka tersebut masih jauh jika dibandingkan sebelum pandemi di tahun 2019 sebesar Rp80,7 triliun.

Fraksi Partai Gerindra DPR RI apresiasi capaian Pemerintah yang berhasil kembali melampaui target, Penerimaan pajak tembus 114,05% dan Penerimaan PNBPN yang tercapai hingga 123,6%. Dengan kinerja tersebut, *tax ratio* Indonesia mencapai 10,4% pada 2022, atau meningkat dibandingkan posisi *tax ratio* 2021 yang sebesar 9,11%.

Kami juga mendorong Pemerintah untuk dapat mempertahankan capaian *tax ratio* Indonesia hingga *double digit*, serta meningkatkan rasio perpajakan di tahun-tahun mendatang, setelah diberlakukannya UU HPP secara optimal, dengan tetap menjaga momentum kebangkitan serta akselerasi ekonomi kelompok miskin dan rentan. Strategi yang harus dikuatkan oleh Pemerintah adalah konsolidasi belanja dan menggenjot penerimaan antara lain mengoptimalkan potensi Penerimaan Perpajakan dan PNBPN, dengan memperhatikan pemerataan dan berkeadilan.

Sementara itu, **Belanja Negara** mencapai Rp3.096,2 triliun atau terserap sebesar 99,67% dari pagu yang ditetapkan. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Pemerintah Pusat sebesar Rp2.280,0 triliun atau 99,06% dari APBN, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mencapai Rp816,2 triliun atau 101,42% dari APBN.

Belanja modal mencapai Rp240,5 triliun dan belanja pembayaran bunga utang mencapai sebesar Rp386,3 triliun pada 2022. Kemudian, belanja modal turun (Rp209 triliun) dan untuk bunga utang naik (Rp441 triliun) pada APBN 2023. Tren kenaikan pembayaran bunga utang lebih pesat dari belanja modal pada beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, realisasi Belanja Negara, terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp460,4 triliun atau 2,35% dari PDB. Angka defisit



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



ini lebih rendah dari target APBN sebesar 4,69 persen dan juga lebih kecil dibandingkan defisit tahun 2021 yaitu sebesar 4,57 persen dari PDB.

Kami mengapresiasi langkah Pemerintah yang telah berhasil menurunkan realisasi defisit anggaran pada 2022, serta batal merealisasikan sebagian dari target penarikan utang baru di 2022. Dengan penarikan SBN hanya terealisasi Rp658,8 triliun atau 68,5% dari target. Langkah tersebut relevan dengan semangat kita bersama untuk terus menjaga APBN lebih sehat dan aman. Melalui *spending better* dan mendukung konsolidasi fiskal pada 2024, agar secara bertahap mengurangi beban utang di tahun-tahun mendatang.

Fraksi Partai Gerindra DPR RI memberi apresiasi terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,3% pada 2022. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 5,2%. Tercatat, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif: sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,99% diikuti oleh sektor akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 13,81%.

Sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,64%. Pertumbuhan sektor manufaktur dan perdagangan juga ikut berperan dalam penurunan tingkat pengangguran 2022. Lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak berada pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 28,61%. Perdagangan besar dan eceran sebesar 19,36%, dan Industri pengolahan sebesar 14,17%. Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendorong Pemerintah lebih fokus dalam mengatasi terus menyusutnya sektor industri manufaktur hingga produktivitas yang semakin menurun. Pemerintah perlu memastikan dukungan APBN untuk sektor yang menyerap tenaga kerja lebih banyak, yaitu: sektor industri manufaktur, serta pertanian dan perikanan.

Mengenai tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan angka kemiskinan tercatat menurun pada 2022. Tercatat peningkatan penduduk yang bekerja sebanyak 4,25 juta orang, lebih tinggi dibanding jumlah yang masuk angkatan kerja yaitu 3,57 juta orang. Tingkat pengangguran berada pada level 5,86% pada 2022. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya 6,49%. Meski belum sepenuhnya kembali ke level sebelum pandemi yang hanya 5,23%.

Tingkat kemiskinan kembali menurun ke level single digit, setelah mengalami kenaikan hingga double digit pada 2020 akibat pandemi. Pada September 2022 tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,36 juta orang atau 9,57%. Lebih detail,



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara | Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



jumlah penduduk miskin masih lebih banyak di daerah pedesaan (14,38 juta orang) dibandingkan di daerah perkotaan yang mencapai 11,98 juta orang miskin.

Pada 2022, NTP dan NTN melanjutkan tren meningkat hingga mencapai masing-masing sebesar 107,33 poin dan 106,45 poin. Angka tersebut berhasil melebihi target indikator pembangunan di 2022. Namun demikian, Perlu diketahui, kinerja NTP pada 2022 yang melampaui target, lebih banyak disebabkan adanya *windfall* harga komoditas global terutama di sektor perkebunan. Merespon menurunnya harga komoditas global, Pemerintah perlu mengantisipasinya dengan kebijakan yang tepat agar target NTP dan NTN pada tahun-tahun mendatang dapat terpenuhi. Pemerintah perlu bersungguh-sungguh memenuhi kebutuhan para petani dan nelayan, antara lain melalui kemudahan mengakses pupuk bersubsidi untuk petani dan BBM bersubsidi untuk para nelayan. Termasuk dengan menyediakan harga-harga pokok yang relatif murah, melalui pembangunan industri pertanian, bukan bergantung pada impor.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI, Wakil Pemerintah, dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan beberapa pokok pikiran yang telah kami sampaikan, maka Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan "**menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 untuk dibahas lebih lanjut.**" Demikian pandangan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPR RI, Semoga Allah Yang Maha Kasih membimbing kita semua kepada tujuan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan negara adil dan makmur.

Billaahittaufiq walhidaayah

Wassalaamu'alaikum warohmatullaahi wabarakaatuh.

Jakarta, 24 Agustus 2023

PIMPINAN
FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Wakil Ketua

Wakil Sekretaris


Mohamad Hekal, MBA
No. Anggota A-103


GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA
DPR - RI


H. Bambang Haryadi, SE
No. Anggota A-109



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FRAKSI PARTAI NasDem

2019 - 2024

Sekretariat : Gedung MPR / DPR RI Nusantara I Lantai 22 Ruang 2209-2210
Jln. Jend. Gatot Soebroto - Senayan Jakarta 10270 Telp. (021) 5755926 Fax. (021) 5755927



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PANDANGAN FRAKSI PARTAI NASDEM DPR RI

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TA 2022

Disampaikan oleh:

H. Charles Meikyansah, S.Sos.,M.I.Kom

Nomor Anggota: A-378

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Syaloom, Om Swastyastu,
Namo Budaya, Salam Kebajikan.
Salam Restorasi !!!**

Yang terhormat:

Ketua dan Pimpinan DPR RI

Segenap Anggota DPR RI

Sdr. Menteri Keuangan beserta Jajarannya

Serta hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama izinkan kami untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang tiada terkira sehingga kita berkumpul pada Rapat Paripurna hari ini dalam rangka penyampaian Pandangan Fraksi atas Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN 2022). Semoga semangat perubahan dan restorasi masih menaungi kita semua dalam menyongsong Indonesia maju adil dan sejahtera.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan serta hadirin yang kami muliakan.

Tahun 2022 bukanlah tahun yang mudah bagi perekonomian Indonesia. meskipun telah memasuki tahun ketiga pasca pandemi Covid-19 berbagai tantangan dan resiko ketidakpastian global masih menyelimuti upaya pemulihan ekonomi nasional. Program vaksinasi dan pelonggaran pembatasan mobilitas masyarakat mendorong munculnya lonjakan permintaan barang dan jasa namun tidak dibarengi dengan penawaran dari sisi produksi akibat disrupsi rantai pasok. Kebijakan Zero Covid-19 di Tiongkok dan juga tensi geopolitik terutama yang bersumber dari perang Rusia-Ukraina mendorong lonjakan harga komoditas terutama pangan dan energi, serta memicu tekanan inflasi yang persisten tinggi di berbagai negara di dunia.

Kondisi tersebut direspon oleh pemerintah dengan menggunakan APBN sebagai *shock absorber* yang meminimalisir transmisi krisis global ke perekonomian domestik. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah melalui penyehatan APBN sejalan dengan *windfall* penerimaan negara sebagai dampak kenaikan harga komoditas internasional. Selain itu, komitmen pemerintah dalam implementasi kebijakan hilirisasi industri berbasis SDA memberikan energi bagi industri manufaktur dalam negeri dan menciptakan investasi.

Realisasi **pertumbuhan ekonomi Indonesia** dapat tumbuh 5,31 persen atau di atas target APBN yaitu 5,2 persen. Secara level, PDB riil tahun 2022 sudah berada 7,0 persen di atas level PDB 2019. Pencapaian tersebut tentu cukup membanggakan di tengah lemahnya pemulihan ekonomi global. Meskipun, Fraksi Partai NasDem berpandangan bahwa situasi tersebut masih dapat ditingkatkan mengingat laju pertumbuhan konsumsi sebesar 4,93% tahun 2022 belum kembali ke level pra-pandemi.

Realisasi **inflasi** tahun 2022 tercatat 5,5% berada di atas asumsi APBN 2022 sebesar 3,0%. Fraksi Partai NasDem menganggap kondisi tersebut tidak dapat dihindarkan akibat kenaikan harga komoditas global yang tinggi dan diperparah oleh konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina serta kenaikan suku bunga The Fed. Lebih jauh, akibat kenaikan harga minyak internasional, pemerintah harus menyesuaikan harga BBM pada September 2022 yang berdampak pada kenaikan harga secara umum. Selain itu, gangguan suplai pangan domestik juga memberikan tekanan di pertengahan tahun. Oleh karena itu, Fraksi Partai NasDem meminta agar Pemerintah memberikan perhatian yang lebih terkait tata kelola pangan terutama terkait distribusi dan ketersediaan pangan yang memicu peningkatan inflasi dari komponen bergejolak (*volatile food*) sebesar 5,61%.

Realisasi **nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS)** pada 30 Desember 2022 mencapai Rp 15.731 per dolar AS atau Rp 14.871 per dolar AS secara rata-rata *year to date*. Posisi nilai tukar rupiah ini meleset dari target asumsi makro dalam APBN 2022 yang sebesar Rp 14.350 per dolar AS. Kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed yang cukup agresif sejak Maret 2022 untuk meredam tekanan inflasi menyebabkan arus modal masuk ke Amerika Serikat. Dampaknya, terjadi apresiasi dolar terhadap berbagai mata uang lain yang terlihat dari pergerakan Indeks Dolar yang meningkat. Di Indonesia, pelemahan nilai tukar Rupiah dapat tercermin pada pergerakan cadangan devisa yang turun

hingga triwulan III 2022, penurunan ini utamanya disebabkan oleh arus modal keluar akibat kenaikan suku bunga internasional meski masih tertahan oleh surplus neraca perdagangan yang diuntungkan dari kenaikan harga komoditas.

Lebih jauh, Fraksi Partai NasDem mengapresiasi kerja keras pemerintah dimana proses pemulihan ekonomi Indonesia terjadi secara inklusif yang tercermin dari peningkatan kualitas berbagai indikator kesejahteraan masyarakat tahun 2022 dibandingkan 2021 dimana Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari 6,49 persen menjadi 5,86 persen, Tingkat Ketimpangan (rasio gini) tetap 0,381; Angka Kemiskinan menurun dari 9,71 persen menjadi 9,57 persen; dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 72,29 menjadi 72,91.

Pimpinan Sidang, Menteri Keuangan dan Hadirin yang Kami Hormati

Fraksi Partai NasDem memandang bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022 adalah konsistensi dan kerja keras Pemerintah dalam memastikan pengelolaan anggaran negara dijalankan secara transparan dan akuntabel. Meskipun dalam LKPP audited yang disampaikan BPK tersebut juga mengungkap adanya temuan-temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berbagai temuan tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP tahun 2022. Opini WTP atas LKPP Tahun 2022 tersebut didasarkan pada opini WTP atas 82 Laporan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 2022 yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP Tahun 2022.

Fraksi Partai NasDem memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas komitmen pemerintah dalam mempertahankan Opini WTP tersebut di tengah peliknya pengelolaan keuangan Negara akibat pandemi Covid-19. Meskipun bukan tujuan akhir, pencapaian tersebut setidaknya menjaga kepercayaan publik atas pengelolaan keuangan Negara.

Pimpinan Sidang, dan Hadirin yang Kami Hormati.

Berdasarkan uraian di atas dan pendalaman atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP tahun Anggaran 2021, Fraksi Partai NasDem memberikan catatan sebagai berikut:

Laporan Realisasi APBN

Dalam Laporan Realisasi APBN dijelaskan bahwa Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.635,8 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.034,5 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp595,6 triliun, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp5,7 triliun. Realisasi pendapatan negara tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam APBN TA 2022, yaitu 116,31 persen atau tumbuh 31,05 persen dibandingkan realisasi tahun 2021.

Fraksi Partai NasDem mengapresiasi pencapaian pemerintah dimana rasio perpajakan (*tax ratio*) Indonesia akhirnya kembali ke level double digit, yakni sebesar 10,39%. Angka tersebut setara dengan proyeksi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang sebesar 10,4%. bahwa negara yang sustain itu diharapkan setidaknya mengumpulkan *tax ratio* sebesar 15%, termasuk kepabeanan dan cukai. Oleh karena itu, pemerintah masih memiliki ruang untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mengurangi *policy gap* dan *compliance gap* yang masih menghambat kinerja penerimaan.

Selain itu, Fraksi Partai NasDem menyoroti temuan BPK yang menemukan bahwa pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 39 K/L minimal sebesar Rp2,38 Triliun serta pengelolaan Piutang Bukan Pajak pada 21 K/L sebesar Rp727,11 Miliar belum sesuai ketentuan. Oleh karena itu Fraksi Partai NasDem meminta pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi BPK agar memerintahkan seluruh menteri/pimpinan lembaga untuk: menginventarisasi seluruh jenis penerimaan pada K/L dan menetapkan dasar hukum atas PNBP yang belum memiliki dasar hukum; meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan PNBP dan Piutang Bukan Pajak pada K/L; menetapkan mekanisme implementasi penilaian dan evaluasi kinerja pengelolaan PNBP pada K/L; dan melakukan optimalisasi penagihan Piutang Bukan Pajak melalui upaya-upaya strategis dan sistematis dalam rangka penyelesaian Piutang Bukan Pajak.

Dari sisi Belanja, Pada TA 2022 Realisasi Belanja Negara mencapai Rp3.096,3 triliun atau 99,67 persen dari pagu APBN TA 2022. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.280,0 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp816,2 triliun. Fraksi Partai NasDem menyoroti masih adanya praktek Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 78 K/L minimal sebesar Rp16,39 Triliun belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Oleh karena itu, Fraksi Partai NasDem meminta kepada pemerintah untuk menyempurnakan mekanisme penganggaran untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses penganggaran; dan melakukan identifikasi sebab mendasar terjadinya permasalahan berulang dalam pengelolaan belanja, dan selanjutnya mengembangkan sistem pengendalian yang efektif untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya permasalahan berulang tersebut.

Neraca

Posisi keuangan Pemerintah ditunjukkan dalam Neraca per 31 Desember 2022 terdiri dari Aset sebesar Rp12.325,5 triliun yang meningkat dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.454,6 triliun, Kewajiban sebesar Rp8.920,6 triliun meningkat dari posisi 2021 sebesar Rp7.538,3 triliun, dan Ekuitas sebesar Rp3.404,9 triliun atau turun dari ekuitas tahun 2021 sebesar Rp3.916,3 triliun

Fraksi Partai NasDem menyoroti permasalahan penyelesaian Piutang Negara Pemberian Pinjaman tidak sepenuhnya optimal. Nilai piutang macet pemberian pinjaman posisi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.589.798.561.597,00 atau 16,51% dari total piutang pemberian pinjaman, terdiri atas piutang pokok sebesar Rp7.414.925.513.015,00 dan piutang non pokok sebesar Rp5.174.873.048.582,00 terutama dari pihak BUMN. Fraksi Partai NasDem meminta kepada pemerintah menindak BUMN yang bermasalah untuk

menyelesaikan piutang negara yang macet, serta mengamankan hak tagih piutang negara dalam proses likuidasi.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dijelaskan bahwa SAL awal Tahun 2022 sebesar Rp337,8 triliun. Setelah memperhitungkan SiLPA dan penyesuaian SAL, maka SAL akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp478,9 triliun. SAL tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai *fiscal buffer* dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian pada tahun 2023. Fraksi Partai NasDem memahami bahwa penggunaan Saldo Anggaran Lebih menjadi alternatif pembiayaan non-utang yang cukup baik di tengah ketidakpastian global namun dana cadangan yang cukup besar dan biaya perolehan hutang yang tidak murah tentu menjadi permasalahan tersendiri.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan serta hadirin yang kami hormati.

Demikian pandangan-pandangan Fraksi Partai NasDem DPR RI tentang RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2022 ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai NasDem DPR RI menyatakan **DAPAT MENERIMA DAN MELANJUTKAN** Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022 menjadi Undang-Undang.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

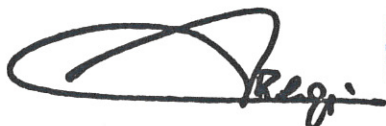
Om Shanti Shanti Om, Nammo Buddhaya, Salam Kebajikan,

Salam Restorasi!

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,



Roberth Rouw

Nomor Anggota: A-405



Saan Mustopa

Nomor Anggota: A-367



FPKB

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI



**PANDANGAN FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022**

*Disampaikan Oleh Juru Bicara FPKB DPR-RI:
Ela Siti Nuryamah, S.Sos
Nomor Anggota: A-8*

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua,***

Yang Terhormat, Pimpinan Sidang Paripurna
Yang Terhormat, Bapak dan Ibu Anggota Dewan
Yang Terhormat, Saudari Menteri Keuangan RI
Serta Hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir, baik secara fisik maupun virtual, dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini untuk mendengarkan penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing dan mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa dan negara, sehingga kita dapat meneladani beliau untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang *baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur*.

**Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Serta
Hadirin Yang Terhormat,**

Tahun 2022 merupakan tahun dimana pandemi covid-19 sudah mulai mereda, namun ketidakpastian global terus berlanjut dengan adanya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan tensi geopolitik dunia ikut meningkat. Ketidakpastian global tersebut menjadi tantangan besar bagi pembangunan nasional mengingat konflik antara Rusia-Ukraina menyebabkan kelangkaan pangan dan energi hampir di seluruh dunia.

Adanya tantangan dinamika geopolitik global membuat pencapaian asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan fiskal berujung pada melesetnya beberapa pencapaian target yang ditetapkan. Namun dengan semangat persatuan seluruh komponen bangsa, pembangunan Indonesia tetap dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kemajuan yang berarti untuk mewujudkan negara yang sejahtera.

Realisasi **Pertumbuhan ekonomi** Indonesia tahun 2022 sebesar 5,3 persen, melebihi asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN 2022 yang dipatok sebesar 5,2 persen. FPKB mengapresiasi dengan kinerja pemerintah atas tercapainya target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ini. Pemulihan ekonomi dari krisis akibat pandemi yang diharapkan bisa terjadi dapat diwujudkan pada tahun ini. Konsumsi rumah tangga menjadi motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan sebesar 4,9 persen, yang menandakan optimisme masyarakat terhadap pemulihan dari krisis pandemi, yang dapat menggerakkan roda perekonomian dengan kuat. Namun, FPKB menyoroti perlambatan pertumbuhan komponen ekspor Indonesia dibandingkan tahun 2021. Walaupun masih tumbuh positif, produk-produk ekspor Indonesia perlu dilakukan diversifikasi agar dapat menstabilkan ekspor dan menambah daya saing perekonomian. FPKB juga meminta agar pemerintah tetap memprioritaskan sektor pertanian untuk ditingkatkan nilai tambahnya, karena di sektor tersebut yang memiliki tenaga kerja yang paling besar, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih inklusif.

Realisasi **Inflasi tahun 2022 melebihi asumsi yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 5,5 persen.** Capaian tersebut diatas target asumsi APBN 2022 yang sebesar 3,0 persen. Kenaikan Inflasi paling tinggi ada pada komponen harga diatur Pemerintah dengan adanya penyesuaian harga BBM pada September 2022. Kebijakan ini menyebabkan penurunan kesejahteraan yang sudah membaik pada awal tahun. FPKB menilai bahwa pemerintah melakukan

perubahan harga BBM terlalu signifikan sehingga menimbulkan gejolak dan tekanan pada kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk pekerja informal.

Terkait dengan tingkat **suku bunga SBN 10 Tahun**, realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar 7,02 persen dari yang ditargetkan sebesar 6,82 persen. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang sebesar 6,38 persen. Suku bunga yang tinggi ini berdampak pada beban APBN dimasa depan yang bertambah besar seiring meningkatnya kewajiban pembayaran bunga utang. FPKB meminta pemerintah agar terus melakukan reformasi struktural perekonomian Indonesia agar memiliki fundamental yang semakin kuat, efisien, dan berdaya saing, sehingga suku bunga SBN ini dapat menurun.

Realisasi rata-rata **nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2022** sebesar Rp 14.871, lebih rendah dari target asumsi APBN 2022 yang sebesar Rp 14.350. Pelemahan nilai tukar rupiah ini disebabkan oleh derasnya arus modal keluar di pasar keuangan Indonesia yang disebabkan oleh Kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed yang cukup agresif sejak Maret 2022. FPKB menilai bauran kebijakan moneter untuk menjaga nilai tukar rupiah sudah cukup baik mengingat tekanan arus modal keluar cukup tinggi.

Realisasi rata-rata **harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price /ICP*)** pada tahun 2022 meningkat hingga mencapai 97,09 dolar AS per barel. Jauh lebih tinggi dibandingkan target dalam APBN 2022 yang sebesar 63 dolar AS per barel dan rata-rata ICP tahun 2021 yang sebesar 68,51 dolar AS per barel. Naiknya ICP tersebut dipengaruhi oleh Konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang masih tinggi mendorong harga minyak mentah dunia naik tajam di tengah pasokan yang masih terbatas. FPKB meminta agar pemerintah membuat skema yang tepat dengan membuat penyesuaian-penyesuaian ICP secara proporsional yang disesuaikan dengan perkembangan harga minyak dunia.

Lifting minyak bumi mencapai 612,41 ribu barel/hari dan **lifting gas bumi** sebesar 953,56 ribu barel setara minyak/hari, dimana lifting minyak bumi mengalami penurunan produksi dari tahun 2021 yang mencapai 703 ribu barel/hari, dan lifting gas bumi mengalami penurunan dari 994 ribu barel setara minyak/hari pada tahun 2021. Penurunan yang terjadi setiap tahunnya ini harus secara serius dievaluasi, mulai dari perbaikan iklim investasi pada eksplorasi hingga implementasi teknologi *enhanced oil recovery* untuk menambah produksi.

Lebih lanjut, FPKB menyoroti capaian indikator kesejahteraan pada tahun 2022. *Pertama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)* Indonesia TA 2022 tercatat sebesar 5,86 persen, mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada pada 6,49 persen. Sedangkan jumlah Penduduk yang bekerja sebanyak 135,30 juta orang, meningkat sebanyak 4,25 juta orang dari tahun 2021. Penurunan angka pengangguran ini sudah hampir menyamai tingkat pengangguran sebelum pandemi covid-19. Namun perlu diantisipasi terkait masih massifnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi akibat ketidakpastian global karena konflik geopolitik Rusia-Ukraina. *Kedua, Kemiskinan*, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,57 persen atau sebanyak 26,36 juta orang. Dibandingkan dengan September 2021, terjadi penurunan sebesar 0,14 persen poin atau 0,14 juta orang. FPKB menyoroti sensitivitas dari kenaikan harga BBM yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan yang meningkat jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2022. Oleh karena itu pemerintah harus mencari formula yang tepat mengantisipasi gejolak harga minyak dunia agar tidak berdampak besar terhadap tingkat kemiskinan.

Ketiga, Rasio Gini tahun 2022 sebesar 0,381. Angka ini stagnan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang memiliki angka yang sama. Artinya pembangunan di tahun 2022 tidak menurunkan ketimpangan. Oleh karena itu, FPKB meminta kepada pemerintah untuk melakukan pembangunan yang lebih inklusif yang melibatkan masyarakat secara luas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk yang memiliki pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah.

Selanjutnya yang *keempat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI)*, IPM Indonesia tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,62 poin menjadi sebesar 72,91 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 72,29. Kenaikan IPM ini sangat positif, meskipun tidak boleh terjebak dengan angka, karena masih sangat banyak penduduk Indonesia yang belum berkualitas dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun daya belinya.

Terkait dengan penanganan dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian, FPKB mengapresiasi kerja keras pemerintah dalam menangani dampak pandemi. Pemerintah telah berhasil memanfaatkan instrumen APBN untuk meredam dampak pandemi covid-19, baik di sisi Kesehatan masyarakat maupun dari sisi sosial ekonomi masyarakat di tengah masih tingginya dampak pandemi di negara lain.

**Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Serta
Hadirin Yang Terhormat,**

Sesuai hasil pembahasan Pemerintah bersama DPR RI bahwa penyusunan kebijakan fiskal tahun 2022 diarahkan dapat tetap ekspansif dalam rangka menstimulus perekonomian dan mengakselerasi pencapaian target pembangunan dengan sasaran yang lebih terarah dan terukur. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrument kebijakan fiskal tahun 2022 mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Selanjutnya dalam rangka mengetahui hasil pembangunan yang dicapai oleh Pemerintah pada tahun 2022 secara lebih obyektif dan komprehensif, maka dapat dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan APBN TA 2022 sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2022 sebesar Rp2.635.8 Triliun atau 116,31 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp2.266.2 Triliun, dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp 624,5 triliun atau 31 Persen dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp 2.011,3 triliun. Salah satu peningkatan tersebut bersumber dari penerimaan pajak, dimana pada Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2022 sebesar Rp2.034.6 Triliun atau mencapai 114,05 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.783.9 Triliun. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2022 lebih besar Rp486.7 triliun atau lebih tinggi 31,44 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp1.547.8 triliun. Dengan capaian tersebut maka secara berturut-turut penerimaan perpajakan kita berhasil melampaui target yang di patok dalam APBN. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja disektor perpajakan mengalami kemajuan yang cukup signifikan terlebih pasca diberlakukannya undang-undang Harmonisasi Perpajakan.

FPKB sebagai salah satu partai pendukung pemerintah mengucapkan selamat dan mengapresiasi atas capaian besar tersebut. Membaiknya pertumbuhan ekonomi dan naiknya harga komoditas internasional sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak tahun 2022, selain itu meningkatnya konsumsi masyarakat, perluasan basis pajak seperti pengenaan pajak *kripto*, penyesuaian tarif PPN dan tariff cukai juga mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam penerimaan pajak tahun 2022. Namun yang perlu diingat, pencapaian pajak 2022 ditopang oleh harga komoditas yang bersifat fluktuatif,

sehingga pemerintah harus meningkatkan sumber-sumber penerimaan di sektor yang lain untuk mengantisipasi jika harga komoditas menurun.

Sedangkan untuk Realisasi **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** TA 2022 sebesar Rp 595.6 triliun atau mencapai 123,66 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 481.6 triliun. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2022 lebih besar Rp 137.1 triliun atau 29,90 persen lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp458.5 triliun. Realisasi PNBP TA 2022 ini terdiri dari Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp268.8 triliun, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp40.6 triliun, PNBP Lainnya sebesar Rp196.3 triliun dan Pendapatan BLU sebesar Rp89.9 triliun. Masih tingginya harga komoditas sepanjang tahun 2022 menjadi faktor utama naiknya PNBP. Membaiknya kinerja BUMN khususnya sektor perbankan turut memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap naiknya Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan. Namun kinerja BUMN lainnya khususnya yang bergerak di bidang infrastruktur dan transportasi belum memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan Negara. FPKB kembali mengingatkan agar pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap kinerja BUMN khususnya dalam pengelolaan dana PMN sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi Negara.

Selanjutnya, untuk **Realisasi Penerimaan Hibah** TA 2022 sebesar Rp5,7 triliun atau 982,33 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp0,57 triliun. Kenaikan yang cukup besar tersebut di picu oleh semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran K/L untuk melaporkan pendapatan hibah langsungnya kepada Bendahara Umum Negara. FPKB tentu berharap penggunaan dana Hibah dapat memberikan dampak ekonomis dan dikelola secara lebih transparan dan akuntabel.

Untuk realisasi **Belanja Negara** tahun 2022 sebesar Rp3.096 triliun atau atau terelisasi 99,67 persen dari pagu anggaran tahun 2022 berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp1.084,67 triliun dan realisasi belanja non K/L sebesar Rp1.195,35 triliun. FPKB berpendapat bahwa penggunaan anggaran sudah tepat dalam pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi. Namun masih terdapat anggaran yang dialokasikan kepada sektor yang sebenarnya bukan prioritas dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, seperti alokasi untuk infrastruktur padat modal, sehingga dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat belum optimal.

Terkait dengan realisasi Belanja Pegawai, adalah sebesar Rp 402,4 triliun, atau 94,35 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 426,5 Triliun. FPKB mendukung pemerintah untuk terus melakukan rasionalisasi terhadap belanja pegawai dan menyusun skema yang tidak membebani keuangan negara untuk belanja pensiun, namun tetap memperhatikan kesejahteraan pegawai. Terkait dengan Belanja Barang, terealisasi sebesar Rp 426,14 triliun atau sebesar 125,44 persen dari pagu APBN yang sebesar RP 339,7 triliun. FPKB mengkritisi peningkatan Belanja Perjalanan Dalam Negeri yang meningkat sebesar 35,6 persen dibandingkan tahun 2021. FPKB meminta agar pemerintah menerapkan anggaran berbasis hasil secara ketat dalam belanja perjalanan dinas ini sehingga perjalanan dinas dalam negeri mempunyai *output* dan *outcome* yang jelas.

Terkait dengan Belanja Modal pada tahun 2022 terrealisasi sebesar Rp240,57 triliun atau mengalami pertumbuhan yang moderat sebesar 0,39 persen dari tahun 2021 yang sebesar Rp 239,6 triliun. FPKB menyayangkan bahwa pertumbuhan Belanja Modal ini sangat kecil jika dibandingkan dengan komponen belanja lainnya. Selain itu, di masa pemulihan ekonomi seharusnya belanja modal lebih diarahkan kepada padat karya yang dapat menciptakan banyak tenaga kerja dan mempunyai *multiplier effect* tinggi.

Terkait dengan belanja subsidi, peningkatan terbesar ada pada Belanja Subsidi Elpiji, yang pada tahun 2021 sebesar Rp 67,6 menjadi Rp 100,4 triliun pada tahun 2022. FPKB meminta kepada pemerintah untuk segera menjalankan subsidi tertutup untuk elpiji, sehingga subsidi elpiji benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak. Selain itu, FPKB juga meminta agar subsidi pupuk terus ditingkatkan, karena pupuk dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang sangat berkaitan dengan ketahanan pangan nasional.

FPKB juga menyoroti Belanja Lain-Lain BUN yang mencapai Rp 379,9 triliun, dimana angka tersebut melonjak tajam dari tahun 2021 yang sebesar Rp 47,04 triliun. FPKB meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan disiplin fiskal sehingga tidak menjadi belanja yang sangat besar, terlebih dilakukan pada masa pemulihan ekonomi dimana APBN seharusnya digunakan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terancam mengalami *lost learning* karena pandemi.

Selanjutnya untuk realisasi **Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)** sebesar Rp816,23 triliun atau 101,42 persen terhadap pagu anggaran pada APBN sebesar Rp804,78 triliun. FPKB menyayangkan bahwa pertumbuhan

Anggaran TKDD ini hanya 2,4 persen jika dibandingkan dengan Belanja pemerintah Pusat yang tumbuh hingga 15 persen. Padahal di masa pandemi, daerah dan desa menjadi jaring pengaman sosial warga yang kehilangan pekerjaan di kota sehingga daerah dan desa juga mengalami kewalahan dalam menghadapi pandemi covid-19.

Realisasi **Transfer ke Daerah** sebesar Rp748,3 triliun atau 101,57 persen dari Pagu APBN. Secara spesifik, Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp546,4 Triliun atau sebesar 105,40 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN. Sedangkan Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2022, yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp173,16 Triliun atau sebesar 91,33 persen dari Pagu APBN.

FPKB menyoroti rendahnya realisasi dari Dana Transaksi Khusus. Salah satu permasalahan adalah telatnya petunjuk teknis untuk DAK yang masih sering terjadi. Selain itu, FPKB berharap kendala-kendala yang terjadi terkait pelaksanaan transfer ke daerah tersebut tidak terulang kembali FPKB juga meminta agar Peraturan Pemerintah terkait Transfer Ke Daerah dapat segera disahkan agar dapat mempengaruhi pertumbuhan dan pemerataan daerah.

FPKB sangat menyayangkan turunnya **Dana Desa** tahun 2022 yang turun sebesar 5,49 persen dari Rp 71,85 triliun di tahun 2021 menjadi Rp 67,91 triliun pada tahun 2022. Realisasi ini sebesar 99,86 persen dari pagu APBN yang sebesar Rp 68 triliun. Realisasi yang tinggi ini membuktikan bahwa Dana Desa dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk melakukan pembangunan desa. FPKB mendorong agar ke depan Dana Desa senantiasa ditingkatkan hingga 5 miliar per desa, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

Dengan tercapainya target penerimaan Negara dan semakin efektifnya belanja yang dilakukan oleh pemerintah sehingga mampu menekan defisit anggaran TA 2022 sebesar Rp 460,4 triliun, yang berarti 54,80 persen dari jumlah defisit yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp 840,2 triliun, sedangkan untuk realiasi Pembiayaan (Neto) TA 2022 sebesar Rp590,9 triliun yang berarti 70,34 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp840,2 triliun, yang berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp 696 triliun. Pembiayaan investasi sebesar negatif Rp 106,7 triliun. Pemberian/Penerusan Pinjaman sejumlah Rp 2,1 triliun, Kewajiban Penjaminan sebesar negatif Rp 1,1 triliun serta Pembiayaan lainnya sebesar Rp. 667,2 miliar. Jika kita lihat

lebih detail dalam realisasi pinjaman utang luar negeri (neto) naik secara signifikan sebesar Rp 29 triliun atau 149,03 persen dari patokan APBN sebesar Rp 19,5 triliun. FPKB kembali mengingatkan pemerintah untuk mengendalikan utang luar negeri sehingga pembayaran cicilan pokok dan bunga utang yang jatuh tempo tidak membebani ruang gerak fiskal sehingga dapat bereaksi lebih efektif dan efisien. Selain itu, besarnya SiLPA (SiKPA) sebesar Rp 130,6 triliun yang seharusnya dapat digunakan lebih optimal sehingga memberikan nilai ekonomis yang lebih bagi kesejahteraan dan pembangunan nasional.

2. Lebih lanjut, berkaitan dengan **Saldo Anggaran Lebih (SAL)**, dalam Laporan Perubahan SAL dilaporkan bahwa SAL Awal TA 2022 adalah sebesar Rp337,8 triliun, yang selanjutnya terdapat peningkatan SAL Akhir pada Tahun 2022 sebesar Rp 141,2 triliun atau 41,79 persen dari Saldo SAL Tahun 2022 menjadi Rp 478,9 triliun. Pada pelaksanaan APBN Tahun 2022 tidak terdapat penggunaan SAL. Sementara SiLPA TA 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp130,5 triliun atau meningkat 35,07 persen dari SiLPA TA 2021 yang sebesar Rp96,6 triliun.
3. Untuk posisi **Neraca** per 31 Desember 2022 terdiri atas Aset Pemerintah sebesar Rp 12.325,4 triliun atau meningkat 7,60 persen atau sebesar Rp870,7 triliun dibandingkan per 31 Desember 2021, dengan Kewajiban sebesar Rp. 8.920,5 triliun, dan Ekuitas sebesar Rp3.404,9 triliun. Aset Pemerintah tersebut terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp895,4 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp3.759,6 triliun, Aset Tetap sebesar Rp6.729,9 triliun, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp53,6 triliun, serta Aset Lainnya sebesar Rp848,2 triliun.

FPKB meminta agar pemerintah menyelesaikan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima dengan nilai Rp 17,6 triliun, utamanya dari royalti dan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang senilai Rp 5,7 triliun, karena merupakan hasil kekayaan alam yang sepenuhnya harus dirasakan untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, FPKB juga meminta kepada pemerintah agar menyelesaikan piutang pajak dan piutang bukan pajak yang masing-masing mencapai Rp114,4 Triliun dan Rp 323,8 Triliun, sehingga pemasukan dari piutang-piutang tersebut dapat dioptimalkan dalam melakukan pembangunan Indonesia.

4. **Laporan Operasional** Tahun 2022 berasal dari (i) Pendapatan Operasional sebesar Rp2.913,6 triliun (ii) Beban Operasional sebesar Rp. Rp3.150,2 (iii) Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp236,5 triliun (iv) Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp243,7 triliun, dan (v) Defisit Laporan Operasional sebesar Rp480,3 triliun. Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar defisit Rp657,2 triliun, maka dapat diketahui defisit Laporan Operasional tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp177 triliun atau 27 persen.

Terkait beban operasional, FPKB menyoroti Beban Lain-Lain BUN Lainnya Dana Kompensasi yang mengalami peningkatan tajam dari tahun 2021 yang sebesar Rp 89,5 triliun menjadi Rp 340,7 triliun. FPKB meminta kepada pemerintah agar kedepan lebih meningkatkan disiplin fiskal sehingga tidak terjadi pembengkakan kompensasi yang membebani fiskal pada tahun anggaran tertentu.

5. Untuk **Laporan Arus Kas** Tahun 2021 terbagi atas (i) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp220,4 triliun, (ii) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp347,2 triliun, (iii) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp698,2 triliun, dan (iv) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp20,04 triliun.

FPKB mengapresiasi penurunan minus Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi dari minus Rp 535,9 triliun menjadi minus Rp 220,4 triliun. Kedepan FPKB meminta agar pemerintah menghilangkan defisit arus kas bersih aktivitas operasi yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar

6. Terkait **Laporan Perubahan Ekuitas** yang menggambarkan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, FPKB melihat bahwa terjadinya penurunan Ekuitas Akhir 2022 karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti perolehan dari penjumlahan Surplus/Defisit-LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Reklasifikasi Kewajiban Kc Ekuitas. Setelah memperhitungkan Defisit Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp480,3 triliun, Penyesuaian yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar minus Rp 31,3 triliun, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 0,10 triliun, maka Ekuitas Akhir Tahun 2022 adalah

sebesar Rp3.404,9 triliun atau lebih rendah dibandingkan dengan Ekuitas akhir pada 31 Desember 2021 yang sebesar Rp3.916,3 triliun.

**Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Serta
Hadirin Yang Terhormat,**

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2022, BPK kembali memberikan opini “**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**”. FPKB mengapresiasi kerja keras pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan pelaksanaan APBN TA 2022. Namun demikian, LHP BPK atas LKPP Tahun 2022 ini masih menemukan 16 (enambelas) permasalahan terkait Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang ada beberapa catatan penting yang perlu diketengahkan sebagai latar belakang sikap FPKB terkait dengan RUU ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. FPKB mendesak kepada pemerintah untuk memperbaiki skema dan tata kelola Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah agar sesuai dengan ketentuan dan akurat.
2. FPKB mendesak agar pemerintah secara serius melakukan penagihan terhadap Piutang Pajak dan Piutang Penerimaan Negara Bukan pajak serta mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dan PNB
3. FPKB meminta agar pemerintah secara tegas menagih Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang terindikasi kurang disetorkan Sebesar Rp7,66 Triliun, dan menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan kepada Wajib Pajak yang tidak menyetorkan pajaknya.
4. FPKB meminta agar pemerintah meningkatkan kualitas penilaian kinerja anggaran K/L dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan belanja
5. FPKB mendesak agar pemerintah mencari jalan keluar yang paling menguntungkan terhadap *cost-override* proyek Kereta Cepat Jakarta-bandung yang berpotensi mengakibatkan terganggunya keuangan PT KAI

atas kewajiban memenuhi pendanaan *cost overrun* hasil kesepakatan Indonesia-China dari porsi pinjaman.

6. FPKB juga meminta pemerintah untuk terus melakukan pembinaan kepada instansi yang masih mendapatkan Opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Keuangannya, dimana tahun 2022 terdapat 1 (satu) LKKL yang masih mendapatkan opini WDP

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Serta Hadirin Yang Terhormat,

Demikianlah pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 (RUU P2-APBN TA 2022) ini. Selanjutnya dengan mengucapkan ***Bismillaahirrahmaanirrahim***, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI menyatakan **persetujuannya**, agar RUU P2-APBN TA 2022 ini dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Atas segala perhatian yang diberikan, maka kami mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keridloannya. Aamiin.

***Wallahul Muwaffiq llaa Aqwamith Thorieq,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Jakarta, 24 Agustus 2023

**PIMPINAN,
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI**


Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal M.A.P. **Drs. H. Fathan, M.A.P.**
Ketua Fraksi PKB DPR RI Sekretaris Fraksi PKB DPR RI



FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



PANDANGAN

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TA 2022 YANG DIAJUKAN OLEH PEMERINTAH

Disampaikan oleh : RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH
Nomor Anggota : A-560

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan.

Demokrat Bersama Rakyat!

Yang terhormat

- Saudara Pimpinan DPR RI,
- Para Anggota DPR RI dan hadirin yang kami hormati,
- Saudara Menteri Keuangan RI Beserta Jajarannya,
- Rekan-rekan media dan hadirin yang kami hormati

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, karena kita masih dapat menjalankan amanah rakyat dalam menjalankan tugas konstitusional kita sebagai anggota dewan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dalam kesempatan hari ini, ijinkan kami, **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan Pandangan terhadap Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.

SAUDARA PIMPINAN, PARA ANGGOTA DEWAN, MENTERI KEUANGAN RI SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun terakhir defisit APBN lebih dari 3 persen sejak terjadinya pandemi covid-19 tahun 2020. Pemulihan ekonomi di seluruh dunia dan khususnya Indonesia menghadapi tantangan yang berat. Melambatnya perekonomian dunia ditambah situasi perang Ukraina-Rusia memperkuat ketidakpastian ekonomi global. Adanya pengetatan kebijakan moneter beberapa negara maju menyebabkan kenaikan suku bunga secara cepat dan menimbulkan arus modal keluar (*Capital Outflow*) dari berbagai negara berkembang, yang diikuti dengan angka inflasi yang melonjak tinggi di berbagai negara. Meskipun demikian, terdapat situasi *windfall* berupa kenaikan harga komoditas yang juga dinikmati oleh Indonesia.

Pelaksanaan APBN TA 2022 dilakukan untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan menjadikan APBN sebagai *shock absorber* atas situasi ketidakpastian global. Normalisasi aktivitas ekonomi masyarakat dan adaptasi masyarakat atas situasi pandemi membuat ekonomi Indonesia bisa tumbuh dan tahan tekanan eksternal. Situasi pandemi tahun 2022 semakin bisa dikendalikan dengan pelaksanaan program vaksinasi meskipun di awal tahun terdapat gelombang *omicron*. Pada Desember 2022, Pemerintah pun mencabut peraturan PPKM yang sudah berjalan sejak tahun 2020.

RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022 yang substansinya berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah diperiksa oleh BPK yang hasilnya juga sudah disampaikan kepada DPR RI. **Fraksi Partai Demokrat DPR RI mengapresiasi hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).** Diharapkan dengan pencapaian opini WTP dapat terus dijaga dan dipertahankan sehingga memberikan keyakinan kepada rakyat Indonesia bahwa APBN telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel.

SAUDARA PIMPINAN, PARA ANGGOTA, MENTERI KEUANGAN RI SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

Setelah membaca, mempelajari dan menganalisa realisasi APBN TA 2022 yang telah disampaikan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan RI, maka Fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa hal:

1. Terhadap pencapaian indikator makro perekonomian Indonesia tahun 2022, FPD menyoroti realisasi asumsi makro perekonomian Indonesia Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,31 persen, sedikit diatas target APBN sebesar 5,2 persen dan meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 3,6 persen. FPD mengapresiasi pencapaian tersebut karena tahun 2022 dihadapi dengan tantangan perlambatan ekonomi global dan kesulitan lain akibat fluktuasi harga komoditas global. Namun demikian, FPD menyoroti kualitas pertumbuhan ekonomi yang belum memberikan dampak signifikan terhadap turunnya angka kemiskinan, hal ini tercermin dari angka kemiskinan per September 2022 mencapai 9,6 persen dibandingkan September 2021 sebesar 9,7 persen atau hanya menurun 0,1 persen.
 - b. Pencapaian Realisasi tingkat inflasi sebesar 5,5 persen atau jauh diatas target APBN sebesar 3,0 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari kelompok transportasi yang mencapai 15,26% terhadap inflasi 2022. FPD mencermati bahwa keputusan pemerintah menaikkan harga BBM pada awal September 2022 sebagai imbas kenaikan harga komoditas global telah menyebabkan terjadinya inflasi dari komponen harga yang diatur pemerintah (*administered price*) yang diikuti kenaikan biaya transportasi dan biaya logistik lainnya. Tingginya tingkat inflasi tahun 2022 telah berdampak pada naiknya angka kemiskinan pada September 2022 mencapai 26,36 juta atau bertambah sebesar 0,2 juta jiwa dibandingkan Maret 2022. Kondisi ini menggambarkan bahwa mitigasi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pasca kenaikan harga BBM melalui program bantuan sosial hanya mampu menolong sebagian kecil masyarakat miskin dan rentan miskin, sementara sebagian masyarakat yang rentan miskin akan turun menjadi kategori miskin.

- c. Terkait Nilai Tukar Rupiah yang berada pada kisaran rata-rata Rp 14.871/USD, FPD melihat bahwa sepanjang 2022, nilai tukar rupiah mengalami tekanan mengingat The Fed menaikkan suku bunga acuan sejak Maret 2022. Hal tersebut menyebabkan apresiasi dolar AS terhadap berbagai mata uang asing. Situasi tersebut juga menyebabkan terjadinya *capital outflow* sehingga berakibat kepada pergerakan cadangan devisa yang turun hingga triwulan III 2022.
- d. Tingkat suku bunga dan *yield* Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun pada tahun 2022 sebesar 6,96 persen atau lebih tinggi dari asumsi APBN. Pemerintah perlu mencari sumber pembiayaan utang yang lebih murah dan bisa meningkatkan partisipasi investor mengingat tahun 2022 adalah tahun terakhir kebijakan *burden sharing* Pemerintah dengan BI dalam menutupi pembiayaan defisit APBN.
- e. Rata-Rata Realisasi *lifting* minyak dan gas bumi masing-masing mencapai 612,41 ribu barel per hari dan 995 ribu barel setara minyak per hari atau meleset dari target APBN sebesar 703 ribu barel per hari untuk minyak dan sebesar 1.036 ribu barel setara minyak per hari untuk gas bumi. FPD menilai bahwa Pemerintah perlu memperhatikan dengan serius rendahnya angka *lifting* karena *lifting* migas menjadi tolok ukur dalam perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minyak dan gas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta transfer daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas.

2. Terhadap beberapa Pencapaian indikator kesejahteraan tahun 2022, yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,29 atau naik dari tahun 2021 sebesar 72,91;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,86 persen atau turun dari tahun 2021 sebesar;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,57 persen atau turun dari tahun 2021 sebesar 9,71 persen; serta
- d. Gini Rasio atau Tingkat Ketimpangan sebesar 0,381.

APBN harus terus dialokasikan untuk penguatan pemulihan ekonomi

nasional, mengembalikan daya beli masyarakat dan tetap menjaga prioritas program pembangunan guna pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia. Kita perlu mewaspadai potensi dampak tekanannya terutama pada kelompok masyarakat di sekitar garis kemiskinan. Selain itu, kebijakan fiskal yang dijalankan harus bisa menjawab tantangan pembangunan dan peningkatan aksesibilitas masyarakat suatu wilayah terhadap hasil pembangunan sehingga bisa memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Meskipun demikian, FPD menggarisbawahi beberapa pencapaian yang masih jauh dari target dalam RPJMN 2020-2024.

3. **Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada tahun 2022 sebesar Rp 2,635,84 Triliun atau 116,31 persen dari target APBN 2022.** Realisasi pendapatan negara tersebut yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.034,5 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp595,6 triliun, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp5,7 triliun.
 - a. FPD mengapresiasi angka tax ratio 2022 yang mencapai 10,39 atau mendekati angka tahun 2014 sebesar 10,9 persen. Pemerintah perlu terus mempertahankan dan meningkatkan pencapaian tersebut melalui implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sudah disahkan dalam rangka reformasi perpajakan, sehingga dapat menjamin keberlangsungan fiskal dan APBN dimasa yang akan datang.
 - b. Pada Penerimaan PNBPN, Pemerintah perlu memperbaiki tata kelola dan regulasi agar meningkatkan penerimaan PNBPN. Selain itu, perubahan tarif PNBPN pada sektor pelayanan, agar tidak mengurangi kualitas dan pemerataan pelayanan yang dilakukan oleh K/L dan BLU.

4. Realisasi belanja negara mencapai Rp3.096,3 triliun atau 99,67 persen dari pagu APBN TA 2022 atau meningkat Rp309,8 triliun atau 11,12 persen dari realisasi tahun 2021. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.280,0 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp816,2 triliun. FPD mencermati bahwa tingginya realisasi Belanja Negara ini dipengaruhi oleh peningkatan signifikan realisasi Belanja Non K/L pada komponen Belanja Lain-lain untuk pembayaran Subsidi Energi

serta Kompensasi BBM dan Listrik. Pemerintah perlu segera mengubah cara penyaluran subsidi dari berbasis komoditi menjadi berbasis penerima sehingga alokasi dana kompensasi bisa dikurangi dan subsidi bisa tepat sasaran. Untuk mengantisipasi ketidakpastian global, Pemerintah harus memperkuat sektor domestik dengan melaksanakan kebijakan belanja yang mampu meningkatkan permintaan dan daya beli masyarakat. Sektor penting yang perlu mendapat perhatian lebih adalah pertanian dalam arti luas, infrastruktur dasar di perdesaan.

5. Defisit anggaran tahun 2022 sebesar Rp 460,42 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB Tahun 2022. Lebih rendah dari yang ditargetkan dalam APBN sebesar 4,69 dari PDB. FPD mengingatkan kepada Pemerintah agar defisit dikelola dengan baik, efisiensi penggunaan anggaran terus dilakukan dan perencanaan kebijakan yang terukur sesuai prioritas belanja dan target pembangunan sehingga keberlanjutan fiskal nasional tetap terjaga.
6. Laporan posisi Neraca per 31 Desember 2022 terdiri atas Aset Rp 12.325,45 triliun, Kewajiban sebesar Rp 8.920,56 triliun, dan Ekuitas sebesar Rp3.404,89 triliun.
 - a. FPD berpendapat Pemerintah perlu tetap mendorong optimalisasi revaluasi atas Barang Milik Negara (BMN) karena berdasarkan review BPK, Catatan mengenai pengelolaan aset dan Barang Milik Negara selalu muncul setiap tahun. Permasalahan yang selalu berulang menunjukkan bahwa Pemerintah belum memiliki jalan keluar atas penyelesaian permasalahan tersebut Perbaikan tata kelola aset akan menambah jumlah ekuitas negara di tengah bertambahnya nilai kewajiban.
 - b. Terdapat peningkatan kewajiban pada Tahun 2022 yang sebagian besar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). FPD berpandangan bahwa utang dan pembiayaan utang Pemerintah harus dikelola dengan pruden, fleksibel dan terukur. Peningkatan jumlah kewajiban yang tidak terkendali akan mengancam keberlangsungan fiskal pemerintah dimasa yang akan datang.

7. Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pelaksanaan program PC-PEN dengan realisasi mencapai Rp396,2 triliun dari total alokasi sebesar Rp455,6 triliun. Realisasi terbesar terdapat pada Sektor Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp174,5 triliun, yang diikuti dengan Sektor Perlindungan Masyarakat Rp153,4 triliun, dan Sektor Penanganan Kesehatan sebesar Rp68,3 triliun. Dalam rangka mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi, ketidakpastian global dan gangguan eksternal, Pemerintah perlu mencari formula yang tepat sebagai pengganti program PEN yang digunakan untuk perlindungan sosial dan bantalan ekonomi agar roda perekonomian juga bergerak ke arah yang lebih positif.

Berdasarkan catatan diatas, maka **Fraksi Partai Demokrat** ingin menyampaikan catatan kritis untuk menjadi perhatian Pemerintah, yaitu:

1. Pemerintah harus menyelesaikan permasalahan disparitas dan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi antara wilayah yang masih tinggi. Kontribusi kawasan Indonesia timur perlu terus didorong sebab perekonomian Indonesia masih terkonsentrasi di kawasan Indonesia bagian barat, yaitu di Jawa 56,5 persen dan Sumatera 22,0 persen. Data menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi tinggi di suatu wilayah seringkali diikuti pelebaran ketimpangan pendapatan.
2. Dalam situasi Pemulihan Ekonomi dan ketidakpastian global, Program perlindungan sosial harus dimaksimalkan untuk memperkuat pondasi kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, dan termasuk memperkuat daya ungkit UMKM serta dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan dari guncangan ekonomi.
3. Terhadap pelaksanaan APBN 2022, Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam melaksanakan kegiatan penganggaran tahun 2023 dan penyusunan RAPBN 2024 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban agar setiap belanja pemerintah terlaksana secara efektif dan efisien guna menghasilkan implementasi kebijakan yang bermanfaat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

4. Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2022 yang terdiri atas 16 (enam belas) temuan permasalahan. FPD meminta Pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut seperti yang sudah dijabarkan dalam pengantar yang dibacakan Ibu Menteri Keuangan pada Sidang Paripurna sebelumnya.

SAUDARA PIMPINAN, PARA ANGGOTA, MENTERI KEUANGAN RI SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Fraksi Partai Demokrat menerima Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ini untuk dibahas lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pendapat Fraksi Partai Demokrat, semoga APBN dapat dikelola untuk kesejahteraan rakyat, karena Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat! Demi Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik.

Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

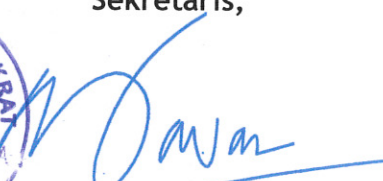
JAKARTA, 24 AGUSTUS 2022
PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc
Nomor Anggota: A-554




Marwan Cik Asan, M.M.
Nomor Anggota: A-535



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086 Website : www.fraksi.pks.id



**PANDANGAN
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
KETERANGAN PEMERINTAH MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Disampaikan Oleh : Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si.
Nomor Anggota : A- 436

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan dan Anggota DPR RI, Saudara Menteri beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Tujuh puluh delapan tahun sudah usia kemerdekaan negara tercinta Indonesia, kita semua perlu untuk merenung apakah kerja-karya yang dilakukan kita semua telah sampai dan/ atau mendekati apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan. Apakah kebijakan APBN 2022 lalu mampu membawa kita semakin mendekati cita-cita kemerdekaan. Hikmah dan manfaat apa yang bisa kita bawa selama pelaksanaan APBN 2022 lalu.

Selanjutnya, untuk menyikapi Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022,

yang telah disampaikan Pemerintah kepada DPR pada Rapat Paripurna DPR-RI, Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) memandang perlu memberikan beberapa catatan penting.

Fraksi PKS berpandangan bahwa tahun 2022 menjadi tahun di mana kekayaan sumber daya alam kita mampu menjadi penyangga keuangan negara. Ledakan komoditas mineral dan batu bara mampu memberikan suntikan bagi penerimaan. Batu bara misalnya, pada tahun lalu sumber daya ini berada pada titik harga tertinggi sepanjang sejarahnya. Satu sisi, kondisi ini mampu memberikan dampak pada perbaikan kinerja penerimaan negara. Dapat dilihat bagaimana penerimaan perpajakan di sektor pertambangan meningkat signifikan.

Fraksi PKS berpandangan bahwa ledakan komoditas dapat melahirkan peluang, atau bisa menjadi penyakit tidur yang melenakan. Fraksi PKS mengingatkan, nisbah ekonomi yang besar ini menyimpan kerentanan jangka panjang. Hal ini seperti pedang bermata dua, sebab di sisi lainnya ledakan komoditas dapat menjadi disinsentif bagi proses industrialisasi. Pada saat ini, eksploitasi komoditas mentah menjanjikan keuntungan ekonomi singkat dibandingkan berinvestasi membangun industri. Sebaliknya, industri mendapatkan tekanan karena harus merogoh pengeluaran bahan baku yang energi semakin mahal. Pada jangka panjang, kondisi ini pun justru memberikan kerentanan karena faktor volatilitas harga.

Fraksi PKS berpandangan fiskal mempunyai peranan yang sangat penting. Penerimaan negara yang kuat akan menawarkan banyak ruang bagi alokasi belanja untuk pembangunan. Persoalannya, selain sumber penerimaan yang tidak berkelanjutan, fiskal juga nyatanya dibebani oleh pengeluaran ambisius. Kondisi ini tentu semakin menekan kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan belanja yang lebih berkualitas. Sebut saja proyek-proyek ambisius seperti IKN dan Kereta Cepat. Proyek yang awalnya direncanakan tidak menggunakan anggaran negara *sepeserpun*, nyatanya kini harus membebani APBN. Triliunan rupiah harus mengalir untuk membiayai proyek ini. Fraksi PKS melihat bahwa penerimaan yang tidak berkelanjutan dan ambisi proyek mercusuar adalah dua persoalan utama. Turunannya adalah tumpukan utang dan alokasi belanja yang berkualitas kian terbatas.

Fraksi PKS menilai bahwa kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN Tahun 2022 masih kurang memuaskan, sehingga berdampak tidak optimalnya upaya meningkatkan dan menjaga kesejahteraan rakyat. Selain itu terkait dengan kualitas akuntabilitas keuangan Negara, Fraksi PKS juga mendesak Pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sebelumnya selama empat tahun berturut-turut mendapatkan Opini WTP menjadi WDP atas Laporan Keuangan tahun 2022. Kemudian, BPK RI juga menemukan 16 (enam belas) permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan yang pada tahun sebelumnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) permasalahan. Hal ini tentu perlu untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah.

Selanjutnya, Fraksi PKS secara lebih khusus memberikan catatan sebagai berikut:

Indikator Makro Ekonomi

1. Fraksi PKS memandang kinerja ekonomi Indonesia 2022 masih kurang mengesankan. Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31 persen lebih tinggi dari target 5,2 persen. Sementara itu, enam asumsi makroekonomi lainnya meleset dan jauh dari target. Target inflasi mencapai 3 persen sedangkan realisasi hingga tahun 2022 mencapai 5,5 persen. Sementara itu, tingkat suku bunga SUN (10 tahun) mencapai 7,02 persen; lebih tinggi dari target sebesar 6,82 persen. Nilai tukar Rupiah terdepresiasi sangat dalam pada 2022 mencapai Rp14.871 yang jauh dari target APBN sebesar Rp14.350. Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US\$97,09 per barrel, juga bergerak jauh dari angka asumsi US\$ 63 per barel. Realisasi rata-rata lifting minyak dan gas tahun 2022 sebesar 612,41 ribu barel per hari dan 953,56 ribu barel setara minyak per hari. Keduanya meleset dari target sebesar 703 ribu bph dan 1.036 ribu bsmph.
2. Fraksi PKS memandang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31 persen belum memuaskan dan setinggi negara-negara sekawasan. Tahun 2022, India bisa tumbuh hingga 9,1 persen; Malaysia naik 8,7 persen; Filipina naik 7,6 persen dan Turki naik 5,4 persen. Dari sisi pertumbuhan pendapatan per kapita, Pencapaian Indonesia juga tidak begitu tinggi. Tahun 2022, pendapatan per kapita Indonesia hanya US\$4.580 yang hanya naik 9,8 persen (yoy). Angka tersebut lebih rendah Malaysia yang bisa tumbuh hingga 10 persen (yoy); Filipina naik 11,2 persen (yoy) dan Vietnam naik 11,6 persen (yoy). Sementara itu, pertumbuhan pendapatan per kapita China mencapai 7,71 persen (yoy). Tahun 2022, pendapatan per kapita Malaysia mencapai US\$11,780; Thailand US\$7,230; dan Indonesia US\$4,580.
3. Fraksi PKS memandang bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 masih jauh dari target pertumbuhan yang ditetapkan pada RPJMN 2019-2024, dimana targetnya sebesar 6 persen dan 6,3 persen masing-masing untuk batas bawah dan batas atas. Dengan pertumbuhan yang demikian maka PDB per kapita diharapkan mencapai US\$5,420 dan US\$5.550. Ketidakmampuan mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi diatas 6 persen akan menyebabkan Indonesia terus terjebak dalam pendapatan menengah.
4. Fraksi PKS memandang bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut juga lebih didorong oleh kenaikan harga komoditas dunia yang meningkatkan kontribusi perdagangan internasional terhadap output. Situasi tersebut hanya temporer dan akan hilang ketika harga komoditas dunia turun. Indonesia tidak perlu terlalu berlebihan melihat kondisi tersebut karena bisa menjebak dan lalai untuk bertransformasi menuju ekonomi yang lebih kokoh. Ekonomi yang dimaksud adalah struktur ekonomi yang tidak bergantung pada pergerakan harga komoditas dunia tetapi ditopang oleh kekuatan ekspor bernilai tambah tinggi.
5. Fraksi PKS menilai realisasi pertumbuhan ekonomi 2022 juga belum sepenuhnya berkualitas sehingga belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Berbagai persoalan ekonomi dan sosial masih belum membaik khususnya tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, hingga kesenjangan. Pertumbuhan

ekonomis yang berkualitas rendah menyebabkan kemampuannya menyerap tenaga kerja terbatas. Situasi yang demikian semakin menjebak sebagian rakyat dalam kemiskinan. Pada sisi lain, tingkat ketimpangan pendapatan semakin parah karena ketimpangan benefit ekonomi yang diterima oleh kelompok bawah.

6. Fraksi PKS menekankan bahwa pemburukan kualitas pertumbuhan ekonomi tahun 2022 semakin nyata. Dari sisi permintaan, kontribusi pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) terhadap PDB tinggal 29 persen. Angka ini sangat mengkhawatirkan di tengah-tengah tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat. Sebelum pandemi COVID-19, kontribusi PMTDB terhadap PDB sekitar 30 persen. Fraksi PKS mempertanyakan bagaimana realisasi PMA dan PMDN yang selama ini diberikan insentif yang tinggi dan menarik bagi investor. Penurunan kontribusi PMTDB terhadap PDB menegaskan bahwa investasi tidak sedang baik-baik saja. Data BPS menunjukkan bahwa peranan PMDTB berupa bangunan menurun, dari 24 persen pada 2019 menjadi 21,6 persen pada 2022.
7. Fraksi PKS berulang kali telah mengingatkan pemerintah terhadap bahaya penurunan performa industri manufaktur karena sangat penting dalam pembentukan output, penyerapan tenaga kerja, ekspor hingga investasi. Sayangnya, belum terlihat hasil dari berbagai kebijakan yang diambil. Tahun 2022, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB tinggal 18,34 persen. Angka itu terus turun dan belum terlihat langkah-langkah strategis dan radikal pada sektor tersebut. Penurunan kontribusi sektor tersebut diikuti dengan perlambatan pertumbuhannya yang rata-rata di bawah pertumbuhan ekonomi.
8. Fraksi PKS selalu menekankan urgensi sektor pertanian karena menjadi lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Sektor tersebut juga menjadi sumber inflasi pangan serta menjadi sektor yang menentukan ketersediaan pangan di dalam negeri. Performa sektor pertanian terus melambat. Saat pandemi COVID-19, sektor tersebut justru tumbuh melesat yang berbeda dengan sektor lainnya. Tahun 2022, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB tinggal 12,4 persen yang pada 2020 sempat mencapai 13,7 persen.
9. Fraksi PKS mendorong pentingnya belanja pemerintah menaikkan kontribusi terhadap PDB. Tahun 2022, kontribusi belanja pemerintah hanya 7,66 persen; yang turun cukup tajam dari angka 9,25 persen pada 2021 dan sebesar 9,66 persen pada tahun 2020. Banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah, mulai dari memperbaiki komposisi belanja agar menjadi lebih produktif hingga meningkatkan kualitas belanja negara. Banyak belanja negara yang tidak tepat sasaran hingga persoalan korupsi yang terus meningkat. Biaya korupsi tersebut tergambar dari rendahnya kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB.
10. Fraksi PKS menilai semakin rapuhnya fundamental ekonomi Indonesia pada 2022. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB yang terus menurun. Tahun 2022, kontribusi sektor tersebut menurun menjadi 18,34 persen yang turun dari 19,34 persen pada 2021. Bahkan, tahun 2020, kontribusi industri manufaktur mencapai

- 19,87 persen. Penurunan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB juga terjadi pada sektor pertanian, dari 13,7 persen (2020) menjadi 13,28 persen (2021) dan 12,4 persen (2022). Penurunan kontribusi kedua sektor tersebut sangat mengkhawatirkan bagi penyerapan tenaga kerja.
11. Fraksi PKS mempertanyakan bagaimana dampak PEN terhadap ekonomi nasional. Total PEN yang telah disalurkan mencapai Rp1.631,15 triliun. Tahun 2020 hingga 2022, anggaran PEN masing-masing Rp575,85 triliun (2020); Rp658,6 triliun (2021) dan sebesar Rp396,7 triliun (2022). Namun, dampaknya belum mampu mengangkat ekonomi Indonesia untuk bisa tumbuh tinggi. Nyatanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pulih dari dampak pandemi COVID-19. Pertumbuhan hanya terbatas di kisaran 5 persen dan mulai menunjukkan perlambatan.
 12. Fraksi PKS menilai benefit realisasi pertumbuhan ekonomi terkoreksi oleh tingginya angka inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,31 persen justru lebih rendah dari tingkat inflasi yang mencapai 5,5 persen. Ini bermakna bahwa secara riil rakyat tidak mendapatkan dampak positif dan pertumbuhan ekonomi. Fraksi PKS mendesak pemerintah fokus pada kenaikan inflasi. Kenaikan inflasi yang tidak terkendali memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional khususnya daya beli. Bagi rakyat kecil, inflasi menyebabkan kehidupan semakin sulit apalagi ekonomi belum pulih dari pandemi COVID-19. Tahun 2022, inflasi nasional mencapai 5,5 persen yang bermakna bahwa pendapatan rakyat tergerus lebih besar daripada manfaat pertumbuhan ekonomi yang dirasakan. Tahun 2022 inflasi inti mencapai 3,36 persen; inflasi harga diatur pemerintah sebesar 13,34 persen; inflasi bergejolak 5,61 persen; inflasi energi dan bahan makanan masing-masing 16,88 persen dan 5,59 persen.
 13. Fraksi PKS menilai bahwa depresiasi Rupiah sepanjang 2022 sangat mengganggu perekonomian. Pada tahun tersebut Rupiah terdepresiasi sangat dalam. Posisi Rupiah akhir tahun 2022 mencapai Rp15.731 per US\$ yang terdepresiasi dari posisi Rp14.269 pada 2021. Depresiasi tersebut mencapai 10 persen (yoy). Realisasi nilai tukar Rupiah sepanjang tahun mencapai Rp14.871 jauh dari target APBN sebesar Rp14.350. Depresiasi Rupiah yang sangat dalam tersebut disebabkan oleh peningkatan harga komoditas dunia, khususnya minyak. Sebagai importir minyak, kenaikan harga tersebut berdampak signifikan terhadap kebutuhan valas yang pada akhirnya menekan Rupiah.
 14. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk memperbaiki berbagai faktor yang memengaruhi nilai tukar Rupiah. Secara umum, nilai tukar Rupiah sangat dipengaruhi oleh persoalan di sektor riil yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Persoalan yang dimaksud seperti tingginya kebergantungan ekonomi pada valas untuk pembayaran bunga dan pokok utang. Selain itu, ekonomi nasional juga bergantung pada impor yang tinggi baik untuk bahan baku/penolong dan barang modal untuk industri. Indonesia juga bergantung pada barang-barang konsumsi.

15. Fraksi PKS menilai bahwa kegagalan pemerintah mencapai target suku bunga SUN menyebabkan lonjakan defisit dan utang. Tingkat suku bunga SUN (10 tahun) 2022 mencapai 7,02 persen; lebih tinggi dari target sebesar 6,82 persen. Hal tersebut berpengaruh terhadap beban fiskal saat ini dan ke depan. Beban fiskal tersebut terlihat dari peningkatan belanja pembayaran bunga utang pemerintah. Porsi pembayaran bunga utang pemerintah berpotensi membengkak mencapai sekitar 20 persen dari belanja pemerintah pusat.

Indikator Pembangunan dan Kesejahteraan

16. Fraksi PKS memandang target penurunan kemiskinan yang ditugaskan kepada pemerintah tidak tercapai pada tahun 2022. Akhir tahun 2022 (per September) angka kemiskinan mencapai 9,57 persen, jauh dari target APBN 2022 sebesar 8,5 - 9 persen. Jumlah penduduk miskin yang mencapai 26,36 juta jiwa masih jauh dari cita-cita kemerdekaan yang pernah dikumandangkan oleh Bung Karno, "Tidak boleh ada kemiskinan di Bumi Indonesia Merdeka". Persoalan kenaikan harga Beras hingga kelangkaan Minyak Goreng dan Pupuk menjadi penanda tekanan pada masyarakat miskin. Tingkat kemiskinan pun masih dibawah kondisi sebelum pandemi, sebesar 9,22 persen. Padahal pada RPJMN 2020-2024 kemiskinan ditargetkan menjadi 7 persen hingga 6,5 persen. Fraksi PKS memandang pemerintah harus serius mengentaskan kemiskinan. Stagnasi penurunan kemiskinan di Indonesia sangat memprihatinkan. Pada 2014 penduduk miskin tercatat sebesar 11,3 persen hingga 2022 hanya berkurang 1,73 persen selama 8 tahun lamanya. Pemerintah juga perlu mewaspadaai masih terdapat 115 juta jiwa rakyat Indonesia yang rentan miskin menurut data Bank Dunia.
17. Fraksi PKS memandang turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional tahun 2022 (Agustus) menjadi 5,86 persen dari sebesar 6,49 persen tahun 2021 dan sebesar 7,07 persen tahun 2020 belum memadai, karena masih di atas rata-rata TPT sebelum pandemi di kisaran 5 persen. Sebagai catatan, pertumbuhan sektor yang padat karya relatif kecil, bahkan sektor pertanian dan industri tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor Industri, pertanian dan perdagangan yang memiliki pangsa tenaga kerja 62,2 persen justru tumbuh di bawah sektor-sektor lain yang minim penyerapan tenaga kerja.
18. Fraksi PKS mencermati sulitnya anak muda mendapatkan pekerjaan telah menjadi keluhan rakyat secara luas. Ini dibuktikan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda yang tinggi. Berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022, TPT Pemuda Indonesia mencapai 13,93 persen pada 2022. Artinya 14 dari 100 angkatan kerja pemuda tidak terserap dalam pasar kerja. Fraksi PKS menantang pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pengangguran muda. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah bahwa tingkat pengangguran usia muda di Indonesia adalah yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Negara lain seperti Thailand sebesar 8 persen dan Vietnam 8,87 persen. Data BPS bulan Agustus 2022 menyebut pengangguran paling banyak berasal dari

kelompok usia 20-24 tahun, yakni 2,54 juta orang. Angka ini setara 30,12 persen dari total pengangguran nasional. Bercermin pada tingginya pengangguran usia produktif sudah selayaknya momentum perubahan digulirkan, karena jika tidak pengangguran muda akan menjadi bom waktu dikemudian hari.

19. Fraksi PKS memandang target penurunan kesenjangan tahun 2022 tidak tercapai. Pada target APBN 2022 dicanangkan rasio gini pada kisaran 0.376 sampai 0,378, sementara realisasinya hanya sebesar 0.381. Rasio gini juga tidak mengalami perbaikan dari posisi 0.381 tahun 2021. Potret ketimpangan pengeluaran juga didukung kondisi ketimpangan kepemilikan harta. Data riset Credit Suisse menunjukkan 66,2 persen total kekayaan di Indonesia hanya dimiliki oleh 10 persen orang terkaya di Indonesia. Sebanyak 1 persen orang terkaya di Indonesia bahkan menguasai 36,6 persen dari total kekayaan di Indonesia. Ketimpangan kekayaan juga dapat terlihat dari jumlah simpanan di bank. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat tabungan di atas Rp 5 miliar sebanyak 120.951 rekening atau hanya 0,6 persen dari total rekening per Maret 2022 dengan nilai Rp4.300 triliun lebih.
20. Sasaran dan Indikator pembangunan yang juga tidak tercapai ialah target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2022 mencapai 72,91, meningkat 0,62 poin (0,86 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (72,29). Jika BPS merilis IPM sebesar 72,91 masuk dalam kategori tinggi, tetapi Hasil penelitian tim IPB University menunjukkan sebaliknya dengan pendekatan Big data desa selama 2 tahun. IPM di pedesaan menurut peneliti menunjukkan kategori sedang hanya sebesar 61,96. Faktanya masih ada penduduk usia sekolah tidak bersekolah, juga usia lewat wajib belajar 12 tahun tapi belum tamat SLTA. Perlu diingat bahwa Pemerintah perlu mengejar target IPM pada RPJMN 2020-2024 sebesar 75,54. Dalam Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2022 yang diterbitkan INSEAD di Fontainebleau, Prancis menunjukkan bahwa daya saing SDM Indonesia menurun, tahun 2021 Indonesia berada pada peringkat 70 kemudian menjadi peringkat 82 pada tahun 2022 dari 133 negara. Tertinggal jauh dari Brunai (41) dan Malaysia (45). Indonesia masih dibawah Vietnam, Thailand dan Philipina. Faktor-faktor yang menyebabkan talenta Indonesia kurang bisa bersaing secara global, seperti minimnya profesional dengan high skill, produktivitas pekerja, kurangnya sanitasi, kinerja lingkungan, minimnya international student, hingga rendahnya jaminan pensiun.
21. Pemerintah pada tahun 2022 mampu mencapai target indikator pada Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 109,00 pada Desember 2022. Rendahnya tingkat pendidikan petani menjadi catatan tersendiri. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga usaha di pertanian masih sangat rendah, selama tahun 2020 – 2022 sekitar 30 – 40 persen hanya tamat SD dan 39 persen tidak sekolah/tidak tamat SD. Biaya produksi beras Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara produsen beras (China, India, Vietnam, Thailand, Philipina) lainnya. Komponen biaya termahal adalah sewa lahan dan biaya tenaga kerja. Harga pupuk Indonesia pun

termahal hanya lebih murah dari India. Dengan biaya produksi beras Indonesia yang tertinggi menjadikan beras Indonesia tidak memiliki daya saing yang cukup dan rawan impor.

22. Sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102,51 tidak tercapai dari target 104 -106. Salah satu penyebab NTN tidak tercapai karena faktor kenaikan BBM. Karena bagi nelayan kecil yang kenaikan harga BBM solar yang mencapai 26 persen lebih membuat kenaikan perbekalan dan operasional lebih mahal. Bahkan untuk mendapat solar bersubsidi nelayan harus mengundi nama di pos pengisian karena terbatasnya pasokan. Sampai tahun 2022 ada 147 kabupaten / kota wilayah pesisir dengan 1,3 juta penduduk miskin seperti nelayan masuk kategori desa miskin ekstrim atau sebesar 12,5 persen dari total penduduk miskin ekstrim. Tingkat kemiskinan pesisir lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, di wilayah pesisir tingkat kemiskinannya sebesar 4,19 persen.

Penerimaan Negara

23. Fraksi PKS mencatat deindustrialisasi yang memberikan pengaruh terhadap kinerja penerimaan perpajakan. Di sisi lain, pemerintah juga belum mampu menciptakan sumber penerimaan yang berkelanjutan. Beberapa hal yang dapat ditinjau, pertama terkait dengan kinerja penerimaan perpajakan dari sektor industri pengolahan secara tren tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain. Hal ini disebabkan karena adanya deindustrialisasi yang terjadi. Kedua, pertambangan juga masih memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam kinerja pertumbuhan penerimaan perpajakan. Demikian halnya dengan penerimaan negara bukan pajak, di mana PNBPSDA dari pertambangan mineral dan batu bara tumbuh signifikan lebih dari 60 triliun. Fraksi PKS memandang industrialisasi melalui hilirisasi belum dapat memberikan pengaruh dalam mendongkrak pajak. Ini tercermin dari masih tingginya sumbangan sektor pertambangan dalam penerimaan perpajakan.
24. Fraksi PKS memandang reformasi fiskal dan administrasi perpajakan belum berjalan optimal. Di satu sisi pemerintah mengandalkan kejadian luar biasa dalam perekonomian untuk dapat menggenjot penerimaan perpajakan. Rasio kepatuhan pajak juga belum optimal menyasar wajib pajak besar. Hal ini tergambarkan pada rasio kepatuhan badan dan orang pribadi non karyawan masih sangat rendah yaitu masing-masing 61,27 persen dan 45,53 persen. Selain itu, basis penerimaan perpajakan yang ada saat ini masih belum mampu menangkap perkembangan aktivitas perekonomian riil, seperti ekonomi informal dan peningkatan ekonomi digital. Selain itu, ancaman perlambatan ekspor dan impor dari negara partner perdagangan terbesar Indonesia dapat memberikan dampak terhadap perekonomian dan perpajakan.
25. Fraksi PKS memandang bahwa realisasi penerimaan tahun 2022 justru menjadi pengingat pemerintah terhadap dua hal esensial. Pertama, bahwa ledakan komoditas batu bara berada pada tingkat harga tertingginya sepanjang sejarah di

- tahun 2022. Meskipun hal ini memberikan nisbah penerimaan yang melebihi target, namun demikian penerimaan ini masih belum mampu melampaui tingkat penerimaan tahun 2019 saat sebelum pandemi. Padahal perekonomian sudah kembali pulih pada 2022 setelah pandemi berakhir. Artinya, peluang penerimaan perpajakan dengan potensi tersebut pastinya dapat didorong lebih besar lagi.
26. Hal esensial kedua, adalah ledakan komoditas mulai berakhir sehingga berpotensi dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan penerimaan perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari ekspor Indonesia pada triwulan I 2023 yang tumbuh minus 2,5 persen. Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah. Ledakan komoditas memang berkah, namun jangan sampai kondisi ini justru melenakan. Jalan keluar musti dirumuskan dengan cermat, bagaimana skenarionya dan apa saja langkahnya untuk mengkompensasi penurunan pada tahun depan.
27. Fraksi PKS melihat bagaimana peningkatan PNB dari kekayaan yang dipisahkan tidak sebanding dengan gelontoran triliunan rupiah untuk menyuntik BUMN yang merugi. Apabila ditinjau, dari total sekitar Rp40 triliun sumbangan BUMN, hampir Rp25 triliun disumbangkan oleh BUMN di sektor keuangan yakni perbankan. Sedangkan sekitar Rp10 triliun ditopang oleh BUMN energi (PT Pertamina sebesar Rp2,9 triliun) dan PT Telekomunikasi Indonesia (Rp7,7 triliun). BUMN yang penerima PMN bahkan tidak masuk dalam 10 besar kontributor setoran dividen. Artinya, secara neto, penerimaan negara dari dividen tidak seberapa menopang penerimaan negara. Sebab, suntikan modal untuk membiayai proyek mercusuar dan ambisi infrastruktur tanpa fisibilitas juga sangat besar.

Belanja Pemerintah Pusat

28. Fraksi PKS mencatat Belanja Negara di APBN 2022 mengalami perbaikan realisasi dari alokasi perubahan Rp3.106,42 triliun dengan realisasi Rp3.096,26 triliun atau kemampuan penyerapan Belanja Negara 99,67 persen jika dibandingkan dengan Belanja Negara di APBN 2021 belanja negara mengalami *over budget* dari alokasi Rp2.750,03 triliun dengan realisasi Rp2.786.41 triliun atau 101,32 persen. Namun Belanja Negara pada APBN 2022 masih terdapat selisih yang cukup besar antara anggaran dan pelaksanaan sebesar Rp10,16 triliun yang belum terserap, walau secara persentase selisih 0,33 persen. Kemudian, porsi kontributor terbesar Belanja Negara adalah Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang mencapai 101,42 persen (*over budget*) dari alokasi anggaran Rp804,78 triliun dan Belanja Pemerintah Pusat 99,06 persen dari alokasi anggaran Rp2.301,64 triliun. Capaian realisasi Pendapatan Negara hingga 116,31 persen mampu menolok Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dan mengurangi celah defisit anggaran dari perencanaan Rp840.22 triliun menjadi Rp460,42 triliun, sehingga terdapat SiLPA Rp130,55 triliun kemudian jika ditambah dengan SAL (Saldo Anggaran Lebih) awal 2022 Rp337,77 triliun dan penyesuaian SAL Rp10,62 triliun, maka SAL akhir 2022 menjadi Rp478,95 triliun yang pada akhir tahun 2021 Rp337,77 triliun. Hal ini masih memberikan indikasi Perencanaan Anggaran Pemerintah yang masih dapat dioptimalisasi lagi. Kemampuan realisasi tersebut juga dapat menjadi bahan analisa masih lemahnya perencanaan Pemerintah dalam APBN 2022.

29. Fraksi PKS mencatat bahwa pada tahun 2022, arah kebijakan BPP (Belanja Pemerintah Pusat) diarahkan di antaranya adalah untuk meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, produktif, dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Tercatat struktur realisasi Belanja Barang adalah belanja tertinggi Rp426,15 triliun atau 18,69 persen dari total BPP, lebih tinggi jika dibandingkan dengan Belanja Modal Rp240,57 triliun atau 10,55 persen, Belanja Subsidi Rp252,81 triliun atau 11,09 persen, dan Belanja Bantuan Sosial Rp161,52 triliun atau 7,08 persen dari total BPP. Fraksi PKS berpandangan bahwa struktur Belanja Pemerintah Pusat 2022 belum secara optimal mencerminkan arah kebijakan Pemerintah dalam nota keuangan ABPN 2022. Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah bahwa Belanja Modal memiliki peran strategis karena pengeluaran anggaran yang dilakukan belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi berbeda dengan belanja barang yang cenderung konsumtif pada satu masa periode akuntansi. Kemudian jika dilihat Pelaksanaan Belanja Pembayaran Bunga Utang yang mengambil porsi Rp386,34 triliun atau 16,94 persen dari total BPP memberikan indikasi betapa besarnya beban utang sehingga mempersempit ruang fiskal pada BPP APBN 2022.
30. Fraksi PKS menemukan bahwa pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial yang mengalami *over budget* sampai dengan Rp161,52 triliun atau 109,56 persen dari alokasi anggaran Rp147,43 triliun memberikan indikasi bahwa apa yang disampaikan oleh Fraksi PKS dalam Pemandangan Umum fraksi APBN 2022 menemukan konteksnya yaitu perlunya Pemerintah untuk melakukan peningkatan anggaran Belanja Bantuan Sosial paska Pandemi Covid-19 pada APBN 2022 lalu. Kemudian Belanja Subsidi yang mengalami realisasi Rp252,81 triliun atau 89,13 persen memberikan indikasi kelemahan Pemerintah dalam kemampuan daya serap anggaran yang dapat berakibat kepada tidak optimalnya program Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Realisasi Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Subsidi adalah belanja yang dapat sangat membantu rakyat pada masa paska pandemi.
31. Fraksi PKS mendukung dan mengapresiasi Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan di bidang pembangunan sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun, Fraksi PKS menemukan bahwa realisasi Belanja Pemerintah Pusat fungsi Pendidikan terealisasi Rp160,14 triliun atau 82,91 persen dari alokasi anggaran Rp193,16 triliun, sehingga memberikan indikasi pembangunan SDM di bidang Pendidikan tidak optimal. Fraksi PKS juga telah mengingatkan Pemerintah terkait kurangnya anggaran kesehatan dalam APBN 2022 yang mengalami penurunan sampai 22,9 persen jika dibandingkan dengan outlook APBN 2021, sehingga Pemerintah melalui Perpres No.98 tahun 2022 menetapkan Belanja Fungsi Kesehatan menjadi Rp121,65 triliun dan mengalami *over budget* 102,31 persen atau Rp124,47 triliun dalam pelaksanaan APBN 2022. Fraksi PKS berpandangan

bahwa hal ini kembali memberikan indikasi masih lemahnya perencanaan Pemerintah dalam BPP pada APBN 2022 lalu.

32. Fraksi PKS mencatat terkait dengan *mandatory spending* yang di amanahkan Undang Undang yaitu alokasi Anggaran Pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan Anggaran Kesehatan sebesar 5 persen dari APBN mengalami realisasi Rp480,26 triliun atau 77,30 persen dari anggaran Rp621,28 triliun dan Rp188,12 triliun atau 73,66 persen dari anggaran Rp255,39 triliun, kembali dapat memberikan indikasi tidak optimalnya kinerja Pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan pada paska Pandemi Covid-19. Kemudian, Fraksi PKS mencermati bahwa dengan membandingkan antara realisasi anggaran Pendidikan Rp480,26 triliun terhadap total realisasi belanja Negara Rp3.096,26 triliun maka realisasi anggaran pendidikan hanya 15,51 persen terhadap Belanja Negara. Fraksi PKS berpandangan bahwa hal ini memberikan indikasi Pemerintah tidak konsisten dengan arah kebijakan Pemerintah terkait dengan *mandatory spending* dan pembangunan kualitas SDM dan Pendidikan. Fraksi PKS juga mencatat permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut oleh Pemerintah berdasarkan LKPP 2022 tentang LHP SPI oleh BPK. Di antaranya adalah bahwa Pemerintah belum menyusun aturan teknis mengenai kriteria belanja dan mekanisme perhitungan alokasi anggaran *Mandatory Spending* dalam APBN.
33. Fraksi PKS juga mencermati bahwa permasalahan lain yang dalam proses tindak lanjut oleh Pemerintah di antaranya adalah yang menjadi perhatian Fraksi PKS namun tidak terbatas seperti RPMK yang masih belum selesai tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Sanksi atas Kinerja Anggaran K/L dalam RPMK tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran (RPMK Omnibus Law); Pemerintah belum menyelesaikan proses pemindahtanganan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku; Pemerintah belum menyelesaikan permasalahan berulang dalam pengelolaan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain baik melalui penyempurnaan kebijakan, sistem informasi pelaporan, sistem dan prosedur, dan upaya lainnya; Pemerintah belum menyelesaikan permasalahan pencatatan ganda aset baik pencatatan ganda antar KL, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara BUMN dengan Badan Lainnya, permasalahan aset dalam status sengketa dan aset *idle* serta permasalahan bukti kepemilikan aset; Pemerintah belum menyelesaikan perbaikan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan dalam proses, ketidaktercapaian output dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja.
34. Fraksi PKS juga memberikan perhatian terhadap beberapa hasil temuan BPK dalam LKPP 2022 diantaranya adalah: (i) Penerapan Sistem SAKTI Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Belum Sepenuhnya Didukung Dengan Pengendalian yang Memadai; (ii) Pengelolaan Fasilitas dan Insentif Perpajakan Tahun 2022 Belum Memadai Sebesar Rp2,73 Triliun; (iii) Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terindikasi Kurang Disetorkan Sebesar Rp7,66 Triliun dan Terlambat

Disetorkan dengan Potensi Sanksi Sebesar Rp616,14 Miliar dan USD1,338.00; (iv) Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 39 K/L Minimal Sebesar Rp2,38 Triliun Serta Pengelolaan Piutang Bukan Pajak pada 21 K/L Sebesar Rp727,11 Miliar Belum Sesuai Ketentuan; (v) Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Belum Sepenuhnya Didukung dengan Kebijakan Pelaksanaan dan Anggaran, serta Mekanisme Verifikasi yang Memadai untuk Memastikan Pemenuhan Kewajiban Pemerintah atas Program Subsidi Bunga/Subsidi Margin Reguler dan Tambahan, serta Imbal Jasa Penjaminan (IJP) KUR kepada Masyarakat dan Badan Usaha Penyalur; (vi) Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 78 K/L Minimal Senilai Rp16,39 Triliun Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan; (vii) Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Dana Bagi Hasil Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility Tahun 2022 Belum Memadai.

35. Hasil Temuan BPK selanjutnya: (viii) Komponen *Cost Overrun* Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Di Luar Hasil Kesepakatan Indonesia-China Belum Ditetapkan Skema Penyelesaiannya dan Pendanaan Cost Overrun Proyek KCJB Hasil Kesepakatan Indonesia-China dari Porsi Pinjaman Berpotensi Membebani Keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero); (ix) Penyelesaian Piutang Negara Pemberian Pinjaman Tidak Sepenuhnya Optimal; (x) Penatausahaan Piutang Perpajakan pada Kementerian Keuangan Belum Sepenuhnya Memadai; (xi) Penatausahaan Barang Sitaan dan Agunan pada Kementerian Keuangan Belum Sepenuhnya Memadai; (xii) Piutang Pajak Macet dan Piutang Pajak Daluwarsa Belum Dilakukan Tindakan Penagihan yang Optimal; (xiii) Tindak Lanjut Normalisasi Aset Tetap Sebesar Rp529,47 Miliar serta Pengelolaan Aset Tetap pada 58 K/L Sebesar Rp36,53 Triliun, Persediaan pada 47 K/L Sebesar Rp11,58 Triliun, dan Aset Lainnya pada 23 K/L Sebesar Rp2,36 Triliun Belum Memadai; (xiv) Pengelolaan Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD), Barang yang dikuasai Negara (BDN) dan Barang yang menjadi milik Negara (BMMN) Belum Sepenuhnya Memadai; (xv) Pengelolaan Kas dan Rekening pada 23 K/L Sebesar Rp61,94 Miliar Belum Sepenuhnya Memadai; dan (xvi) Penyajian Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi pada LKPP Tahun 2022 Belum Sepenuhnya Memadai.
36. Fraksi PKS juga mencermati hasil Pemeriksaan BPK bahwa level capaian kriteria pilar transparansi fiskal oleh Pemerintah masih perlu ditingkatkan. Terdapat satu kriteria di Pilar analisis dan manajemen risiko fiskal dalam level basic, dan tujuh kriteria di Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya dalam level basic dan satu kriteria dalam level tidak dinilai (*not assessed*). Kriteria Pilar tersebut yang masih perlu ditingkatkan seperti analisis kesinambungan fiskal jangka panjang; Kerangka Hukum Hak Sumber Daya; Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya; Administrasi Pendapatan Sumber Daya; Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya; Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya; Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan yang masih dalam tahap Basic, dan kemudian Dana Sumber Daya Alam yang belum dapat masuk dalam penilaian dalam LHP atas LKPP tentang Pelaksanaan Transparansi Fiskal tahun 2022. Hal ini memberikan indikasi

Pemerintah sebagai institusi yang efektif, akuntabel, integritas dan transparan masih perlu ditingkatkan.

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

37. Fraksi PKS memberikan apresiasi atas naiknya realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 yang mencapai Rp816,23 triliun atau meningkat sebesar 3,89 persen dibandingkan tahun 2021. Peningkatan TKDD ini secara nominal dan persentase terbesar ditopang oleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang meningkat Rp51,26 triliun atau 43,75 persen dari periode yang sama di tahun 2021. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Nonfisik), dengan realisasi Rp719,58 triliun atau meningkat 5,88 persen terhadap periode sebelumnya. Tetapi yang masih menjadi catatan Fraksi PKS adalah masih terjadinya penurunan secara berturut-turut untuk DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa yakni 4,01 persen, 7,20 persen, dan 5,49 persen. Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus masih bertahan dengan tren positif sejak Triwulan III.
38. Fraksi PKS mendesak pentingnya pemetaan risiko terkait pengelolaan dan akuntabilitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Hal ini mengingat tingginya nilai alokasi TKDD setiap tahunnya sehingga berpotensi munculnya berbagai modus penyelewengan dan korupsi. TKDD memiliki porsi sepertiga dari anggaran negara dan pada rentang waktu 2017 sampai 2022 mencapai 21 persen sampai dengan 37 persen dalam belanja pemerintah. Sementara itu, pendapatan daerah pada tahun 2017 sampai 2022 mencapai 56 persen berasal dari TKDD, sehingga ketergantungan daerah terbilang masih sangat tinggi. Sepanjang tahun 2004 sampai dengan 2022, KPK telah menangani setidaknya 178 kepala daerah yang terdiri dari 23 gubernur, 155 walikota/bupati/wakil yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Setengah dari jumlah tersebut, tercatat ada 113 kepala daerah yang kasusnya terjadi dalam enam tahun terakhir.
39. Fraksi PKS menyoroti Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2022 sebesar Rp173,16 triliun atau 91,33 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp189,59 triliun. Hal ini berarti Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2022 ini lebih kecil Rp11,47 triliun atau 6,21 persen lebih rendah dari Realisasi TA 2021 yakni sebesar Rp184,64 triliun. Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. DAK Fisik Tahun 2022 Rp54,78 triliun dan Tahun 2021 sebesar Rp57,07 triliun atau turun sebesar Rp2,29 triliun atau 4,01 persen. Sedangkan DAK Nonfisik Tahun 2022 Rp118,38 triliun dan Tahun 2021 sebesar Rp127,57 triliun atau turun sebesar Rp9,19 triliun atau 7,2 persen. Sebagai dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam UU APBN TA 2022. Fraksi PKS mendesak evaluasi menyeluruh sehingga prioritas nasional tidak menjadi indikasi sentralisasi karena mulai dari perencanaan,

penentuan besaran alokasi DAK, sampai kepada evaluasinya ada di pemerintah pusat. Pada akhirnya, daerah penerima DAK hanya sebagai eksekutor yang tidak bisa memiliki kebijakan apapun dalam pengelolaannya. Harapan kedepannya, jadwal perencanaan dan penganggaran daerah menjadi sinkron dengan pemerintah pusat serta tidak ada lagi kendala keterlambatan regulasi dan/atau petunjuk teknis DAK sehingga tetap sesuai dengan jadwal perencanaan di daerah.

40. Fraksi PKS memandang bahwa terjadinya penurunan beberapa elemen TKDD, termasuk Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Nonfisik), dan DID, salah satunya adalah karena masih terdapat daerah yang tidak memenuhi syarat penyaluran. Untuk itu, Fraksi PKS mendesak segera adanya mitigasi risiko terkait berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pemenuhan syarat salur di daerah untuk semua elemen TKDD. Kendala tidak terpenuhinya persyaratan penyaluran oleh pemda masih terkesan karena faktor kelemahan di daerah, sehingga perlu pemetaan masalah dan solusi baik dari sisi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri, sehingga kedepannya tidak ada lagi daerah yang terkendala terkait hal tersebut.
41. Fraksi PKS mendesak adanya mitigasi risiko terkait permasalahan masih tingginya dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank karena hal ini bisa jadi bukan semata-mata karena faktor kelalaian atau kesalahan daerah. Sebagaimana tercatat di Kementerian Keuangan sendiri, bahwa dana pemerintah daerah (pemda) yang tersimpan di perbankan mencapai Rp278,73 triliun per Oktober 2022, karena alasan tingginya penyaluran transfer ke daerah (TKD) pada Oktober 2022. Untuk itu, penting adanya evaluasi menyeluruh baik dari sisi pemerintah pusat maupun daerah sehingga tidak hanya menyudutkan salah satu pihak saja, mengingat TKDD diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas guna mendukung peningkatan kinerja daerah.
42. Fraksi PKS mendukung komitmen pemenuhan mandatory spending untuk pendidikan dan kesehatan terutama melalui porsi TKDD dengan meningkatkan evaluasi secara menyeluruh. Hal tersebut untuk menjamin kualitas TKDD secara keseluruhan baik untuk pendidikan, kesehatan, termasuk subsidi, belanja sosial, pengentasan kemiskinan, dan belanja-belanja pro rakyat lainnya yang berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Anggaran pendidikan untuk 2022 terealisasi Rp480,26 triliun yang dilakukan melalui belanja pemerintah pusat Rp178,36 triliun, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp281,90 triliun, dan pembiayaan Rp20 triliun.
43. Fraksi PKS mendesak adanya penguatan dukungan sistem informasi yang terintegrasi antara pusat dan daerah untuk menjamin terwujudnya sinergi yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan pada sistem pengawasan dan evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah, termasuk untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan UU HKPD dalam rangka meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal nasional, sehingga tidak terjadi sebaliknya (bahkan justru mereduksi semangat desentralisasi).

44. Fraksi PKS mendesak adanya pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan sebagai bentuk mitigasi risiko atas berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi pengelolaan keuangan di desa. Hal ini harus dilakukan mengingat masih tingginya keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama pada aspek penguasaan IT, sehingga dibutuhkan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, baik untuk aparat pemerintah desa, maupun tenaga pendampingan desa. Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait transparansi pengelolaan keuangan desa terutama bagi kepala desa, perangkat desa dan jajarannya.

Defisit dan Pembiayaan

45. Fraksi PKS memandang realisasi defisit anggaran tahun 2022 sebesar 2,35 persen dari PDB atau Rp460,42 triliun belum mencerminkan adanya perbaikan sektor fiskal. Adanya defisit anggaran yang cukup besar menunjukkan bahwa kebutuhan untuk belanja masih lebih tinggi daripada penerimaan negara. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan pembiayaan utang baru untuk menutupi kekurangan anggaran yang ada. Meskipun realisasi defisit lebih rendah dari yang direncanakan, hal yang perlu diperhatikan adalah latar belakang bagaimana nilai defisit itu terbentuk. Sebagai catatan, menurunnya defisit anggaran disebabkan karena capaian penerimaan yang meningkat. Di mana capaian penerimaan sebesar Rp2.034,55 triliun atau 114,04 persen dari target APBN disebabkan oleh adanya pengesahan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau diberlakukannya "Tax Amnesti jilid II". Selain itu, kenaikan penerimaan secara signifikan disebabkan oleh kenaikan harga Indonesian Crude Price (ICP) yang volatilitasnya tinggi. Tercatat bahwa 2022 PNBPN terealisasi sebesar Rp595,59 triliun atau 113,96 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja tetap tinggi sebesar Rp3.096,26 triliun atau 99,67 dari APBN. Artinya, APBN masih rentan terjadinya defisit di masa mendatang dengan melihat latar belakang komposisi pembentuknya.

46. Fraksi PKS berpandangan bahwa pemerintah masih bermasalah dalam menjaga kesinambungan fiskal. Hal ini terlihat dari masih negatifnya angka keseimbangan primer pada realisasi TA 2022, yaitu sebesar Rp74,08 triliun atau -0,38 persen dari PDB. Defisit keseimbangan primer menunjukkan bahwa sumber pembayaran bunga utang bukan berasal dari pendapatan negara melainkan berasal dari tambahan utang baru atau pembiayaan lainnya sehingga mengakibatkan adanya ancaman terhadap kesinambungan fiskal. Ketergantungan APBN terhadap utang yang dibelanjakan untuk hal yang tidak produktif, seperti pembayaran bunga utang, memberikan gambaran lemahnya kedaulatan fiskal Indonesia. Sehingga sepanjang keseimbangan primer berada di kurva negatif, sulit menjadi kedaulatan fiskal yang dicita-citakan.

47. Fraksi PKS juga mencermati adanya dampak rambatan dari defisit keseimbangan primer. Timbulnya utang baru untuk pembayaran beban bunga utang akan

menambah beban anggaran periode mendatang. Disebutkan bahwa tahun 2022 pembayaran bunga utang mengambil porsi 16,94 persen dari total belanja pemerintah atau Rp386,34 triliun. Nilai tersebut meningkat signifikan dibandingkan pembayaran bunga TA 2021 sebesar Rp343,49 triliun atau meningkat 12,47 persen. Semakin meningkatnya beban bunga utang, efek bola saljunya akan menggerus porsi belanja lainnya. APBN yang semestinya digunakan sebesar-besarnya untuk menyejahterakan rakyat melalui belanja bansos, subsidi dll, justru dialokasikan dengan porsi besar untuk pembayaran bunga utang. Data menyebutkan TA 2022, belanja bansos hanya mengambil porsi 7,08 persen dan belanja subsidi sebesar 11,09 persen.

48. Fraksi PKS memandang akumulasi utang pemerintah hingga akhir 2022 sebesar Rp7.776,74 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,70 persen mengindikasikan kurangnya pemerintah dalam pengendalian utang. Total utang senantiasa meningkat setiap tahunnya, penambahan utang tahun 2022 saja sebesar Rp867,87 triliun atau meningkat 12,6 persen (yoy). Rendahnya pengendalian utang ini terindikasi dari porsi utang pemerintah terhadap PDB yang telah melampaui batas yang direkomendasikan oleh IMF dan International Debt Relief (IDR) dengan rasio sebesar 25-35 persen. Jumlah yang disebutkan tersebut belum memasukkan utang BUMN yang juga dapat dikategorikan menjadi utang negara, karena pemerintah merupakan pemilik saham dominan dari BUMN. Sehingga apabila diakumulasi, maka jumlah utang pemerintah jauh lebih besar dari nilai tersebut di atas.
49. Fraksi PKS mendermati kenaikan utang setiap tahunnya tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan yang berkualitas. Penerbitan utang baru sebagian besar dialokasikan untuk menutup utang lama, baik sebagai sumber pembayaran pokok utang maupun beban bunga utang. Hal ini terlihat dari nominal defisit APBN, jumlah penambahan utang selama satu periode serta beban pembayaran utang. Pemerintah masih konsisten dengan skema "gali lubang, tutup lubang" dalam pengelolaan utang. Terlebih biaya yang harus dibayar dalam penerbitan utang tidaklah murah. Sebagai akibat pemupukan utang yang didominasi SBN sebesar 88,04 persen dari seluruh komposisi utang akhir Desember 2022 dengan yieldnya sangat tinggi sebesar 7,02 persen, Indonesia harus menanggung biaya utang jauh lebih besar dari negara-negara lain yang memiliki rating setara atau bahkan di bawahnya.
50. Fraksi PKS berpandangan bahwa penggunaan anggaran untuk pembiayaan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp86,72 triliun yang sebagian besar ditunjukkan kepada BUMN dan Lembaga dalam rangka Program PEN dan non-PEN belum sesuai dengan tujuan. Dana PMN yang digelontorkan pemerintah tidak memerhatikan risiko fiskal yang berpotensi terjadi pada masa mendatang. Sebagai contoh, proyek KCJB yang membengkak akibat adanya peningkatan biaya (cost overrun). Setelah tahun sebelumnya PT KAI sebagai pimpinan konsorsium BUMN menerima PMN sebesar Rp4,3 Triliun untuk pemenuhan kebutuhan kekurangan setoran modal (base equity) konsorsium BUMN kepada PT KCIC, maka pada 2022

kembali terdapat kesepakatan tambahan dukungan PMN sebesar Rp2,82 Triliun untuk kebutuhan cost overrun porsi ekuitas konsorsium BUMN pada PT KCIC. Semakin bertambahnya PMN yang harus diserahkan pemerintah, semakin besar pula utang yang harus ditanggung. Proyek yang awalnya disepakati sebagai B to B dan tidak menggunakan APBN, karena kecerobohan perencanaan, pada akhirnya menjadi beban keuangan negara.

51. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk mengevaluasi ulang BUMN penerima PMN yang dinilai berkinerja kurang baik. BUMN semestinya dapat menjadi sumber penerimaan pemerintah melalui pembagian dividen, namun demikian banyak BUMN yang masih bersifat cost center. Tindak lanjut perbaikan BUMN juga dinilai belum optimal, dilihat dari banyaknya BUMN yang 'berdarah-darah' hanya untuk tetap beroperasi, sehingga perlu suntikan dana PMN dari pemerintah. Hal ini diperparah dengan kurangtransparannya BUMN dalam mengungkapkan kegiatan-kegiatan kuasi-fiskal yang telah dilaksanakan.
52. Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam penganggaran dan eksekusi program. Pada 2022 tercatat adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp130,56 triliun meningkat 26,01 persen (yoy). Pada 2022 pemerintah tidak mampu memanfaatkan dana SAL, mengakibatkan akumulasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) membengkak menjadi Rp478,95 triliun. Semestinya pemerintah dapat dengan bijaksana dalam pengelolaan anggaran, dalam kaitannya dengan SAL, alih-alih menerbitkan utang baru yang tidak murah, penggunaan dana SAL dapat menjadi alternatif. Karena dana SAL sendiri merupakan hasil penèbitan utang tahun-tahun sebelumnya yang tidak termanfaatkan atau bersifat idle.

Hadirin yang Kami Muliakan,

Fraksi PKS akan selalu mendorong dan memberikan masukan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah sampai ke titik yang optimal. Sebagai sesama bagian dari anak bangsa, Fraksi PKS akan senantiasa terbuka untuk berdiskusi dan berdialog bagi kepentingan bangsa dan negara pada pembahasan nanti.

Demikian Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI agar dapat menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya. Atas perhatian dan kesabaran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

**Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thoriq, Billahi Taufiq wal Hidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

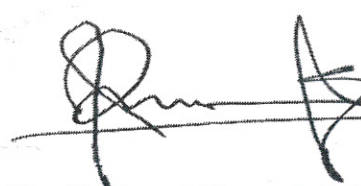
Jakarta, 08 Safar 1445 H

24 Agustus 2023 M

**PIMPINAN FRAKSI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

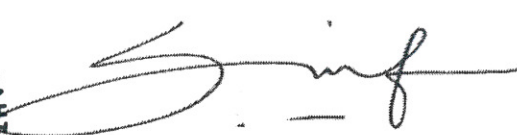
Ketua

Sekretaris



Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.

No. Anggota: A-449



Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.PSi.T.

No. Anggota: A-427



FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Gedung Nusantara I DPR-RI, Lantai 20 Ruang 2009, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 5755810 Fak. (021) 5755811



**PANDANGAN FRAKSI
PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
(P2 APBN) TAHUN 2022**

Dibacakan Oleh : Farah Puteri Nahlia, B.A., M.,Sc
Nomor Anggota : A-501
Daerah Pemilihan : Jawa Barat IX

***Bismillahirrahmanirahim,
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabaraakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,
Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Saudari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang kami hormati,***

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya kita dianugerahkan kesehatan, sehingga dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam rangka penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI atas Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun 2022.

Hadirin Yang Terhormat,

Sesuai dengan amanat Konstitusi Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa salah satu tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Pemerintah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah. Fraksi PAN memberikan apresiasi terhadap pemberian opini WTP pada LKPP 2022, karena merupakan pencapaian ketujuh kalinya secara berturut-turut yang dicapai oleh Pemerintah. Hal ini menggambarkan kinerja APBN yang baik sehingga diharapkan dapat membawa manfaat berupa peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Opini WTP pada LKPP menggambarkan pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah telah dikelola dengan baik dan wajar, sesuai peraturan perundang-undangan maupun Standar Akuntansi Pemerintahan. Akan tetapi, WTP tidak sepenuhnya dapat memberikan gambaran yang utuh menyangkut aspek efisiensi maupun praktik penyimpangan seperti korupsi dalam suatu instansi. Untuk itu, Fraksi PAN berharap Pemerintah harus senantiasa tetap cermat dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan APBN.

***Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Saudari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang kami hormati,***

Mencermati Keterangan Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Fraksi PAN secara khusus memberikan catatan sebagai berikut:

Pertama, Fraksi PAN mengapresiasi capaian **pertumbuhan ekonomi** Indonesia tahun 2022 sebesar 5,3 persen (yoy), melampaui asumsi pertumbuhan ekonomi di APBN sebesar 5,2 persen, dan meningkat dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar 3,7 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 secara nyata telah berpengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran target pembangunan, meredam dampak gejolak ekonomi global, dan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 6,49 persen menjadi 5,68 persen, angka kemiskinan yang juga

turun dari 9,71 persen menjadi 9,57 persen dan indeks pembangunan manusia yang ikut meningkat dari 72,29 menjadi 72,91.

Kedua, Realisasi **penyerapan anggaran belanja negara** tercatat sebesar Rp3.096,3 triliun atau 99,67 persen dari pagu. Fraksi PAN mengapresiasi tingginya serapan anggaran belanja Pemerintah yang optimal. Hal ini menunjukkan pemerintah mampu merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan. Tingginya serapan anggaran belanja mempunyai peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, yaitu meningkatkan dan memelihara kesejahteraan masyarakat. Fraksi PAN memandang bahwa serapan anggaran belanja yang dikelola dengan baik dan optimal, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain menjadi *shock absorber* gejala ekonomi akibat ketidakpastian global, APBN 2022 juga menjadi pengungkit dan pendorong pemulihan ekonomi pasca Covid 19.

Ketiga, Realisasi **pendapatan negara** sebesar Rp2.635,8 triliun setara 116,31 persen dari pagu, atau 31,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Fraksi PAN mengapresiasi pencapaian pendapatan yang melampaui target tersebut sehingga defisit anggaran menjadi lebih terkendali. Hal ini menunjukkan kebijakan pemerintah untuk menjaga dan memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi dan reformasi struktural telah berjalan efisien dan efektif. Fraksi PAN meyakini bahwa jika pemerintah mampu meningkatkan penerimaan negara, hal tersebut akan berbanding lurus dengan rating instrumen fiskal, kemampuan menutup defisit dan utang negara. Pada akhirnya hal tersebut akan membuat negara dan bangsa ini semakin maju, karena realisasi pendapatan dan keuangan negara yang baik dan sehat.

Keempat, Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal tahun 2022 sebesar Rp337,77 triliun, setelah ditambah dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp130,56 triliun dan Penyesuaian SAL sebesar Rp10,62 triliun, sehingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 2022 sebesar Rp478,95 triliun.

Fraksi PAN menilai bahwa saldo anggaran lebih yang terlalu besar menggambarkan belum optimalnya penggunaan instrument APBN. Fraksi

PAN memandang bahwa pemerintah perlu mengkaji secara mendalam terkait besaran Saldo Anggaran Lebih yang ideal, sebagai simpanan dalam upaya motif berjaga-jaga (*Precautionary motive*), apalagi saat ini kita menghadapi ketidakpastian global. Hal tersebut tentu menjadi sangat penting mengingat akumulasi yang tinggi dapat menimbulkan *opportunity cost* yang seharusnya dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Fraksi PAN mengingatkan agar Pemerintah senantiasa dapat merencanakan penganggaran secara matang, efektif dan efisien sehingga segala perencanaan pembangunan akan lebih kuat dalam menghadapi krisis global. Peningkatan SAL akhir yang mencapai 41,7% dibandingkan SAL tahun lalu harus menjadi perhatian serius pemerintah terutama pada Kementerian/Lembaga yang menangani urusan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, terdapat **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)** 2022 sebesar Rp130,56 triliun. Hal ini menggambarkan bahwa APBN dikelola kurang efisien, karena utang Pemerintah yang sudah diserap tidak termanfaatkan secara optimal, padahal bunga utangnya tetap harus dibayar. Besarnya SiLPA ini juga menjadi indikasi kurang matangnya kemampuan birokrasi Pemerintah dalam perencanaan anggaran. Oleh karena itu, Fraksi PAN mengingatkan agar Pemerintah senantiasa dapat merencanakan penganggaran secara matang sehingga tidak menyebabkan SiLPA yang lebih besar di tahun yang akan datang.

Kelima, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya **pemborosan anggaran negara** sebesar Rp25,85 triliun pada tahun 2022. Nilai temuan itu terdiri atas temuan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp11,20 triliun dan temuan terkait ketidakpatuhan sebesar Rp14,65 triliun. BPK telah menemukan setidaknya 16 temuan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Kementerian PUPR, BPK menemukan dua permasalahan belanja subsidi, yakni terkait penyaluran subsidi perumahan Tahun 2022 yang terindikasi tidak sepenuhnya tepat sasaran dan belum memadainya

pengelolaan subsidi selisih bunga/margin kepada debitur KPR bersubsidi, yang klaim asuransinya telah dibayar asuradur (penanggung atau perusahaan asuransi).

Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan temuan BPK tersebut, dengan lebih berhati-hati dalam mengelola APBN agar lebih efisien dan efektif, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

***Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Saudari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang kami hormati***

Berdasarkan pertimbangan dan catatan yang telah disampaikan diatas, Fraksi PAN menyatakan **setuju** atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pemerintah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Demikian Pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban Pemerintah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

***Billahitaufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.***

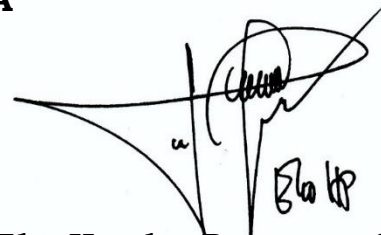
Jakarta, 24 Agustus 2023

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A.

Ketua



Eko Hendro Purnomo, S.Sos

Sekretaris



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

GEDUNG NUSANTARA I, DPR/MPR-RI, JL JEND. GATOT SUBROTO, JAKARTA 10270
Telp. (021) 575 5531 - 575 5497 - 575 5498 - 575 5487 - Fax. (021) 575 5532
E-mail : fraksi_ppp@dpr.go.id / fppp_dpr_ri@yahoo.com / set_fppp@dpr.go.id



**PANDANGAN
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Disampaikan pada Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, Kamis, 24 Agustus 2023
Oleh Juru Bicara Fraksi PPP : Dr. H. Muhammad Aras, S.Pd. MM
Anggota DPR RI Nomor : A - 477

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang

Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan RI beserta seluruh jajarannya,

Yang terhormat Saudara Anggota Dewan dan hadirin sekalian yang berbahagia,

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini dapat menghadiri Sidang Paripurna DPR RI dalam dalam rangka Pandangan Fraksi Atas RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2022.

Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Nabi akhir zaman dan pembawa risalah kebenaran bagi umat manusia.

Yang Terhormat Pimpinan Sidang,

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan telah mencermati sejumlah kemajuan yang berarti dalam pengelolaan anggaran negara. APBN TA 2022 mampu melewati sejumlah tantangan dan guncangan perekonomian akibat ketidakpastian global sehingga, ekonomi bangsa kita tetap kuat dan berkelanjutan. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengapresiasi kinerja Pemerintah, dan meminta dalam setiap pengelolaan APBN di tahun-tahun mendatang agar semakin baik, tepat sasaran, tepat waktu, dan akuntabel. Selanjutnya **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** meminta agar kinerja APBN 2022 ini dapat dijadikan sebagai momentum pertumbuhan ekonomi

yang terus berkelanjutan, dan menjadi modal yang kuat bagi pelaksanaan APBN pada tahun-tahun mendatang.

Yang Terhormat Pimpinan Sidang,

Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2022 mencapai Rp2.635,8 triliun telah melampaui target yang ditetapkan dalam APBN TA 2022, yaitu 116,31 persen atau tumbuh 31,05 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Capaian tersebut didukung oleh peningkatan tax ratio dari 9,12 persen pada tahun 2021 menjadi 10,39 persen pada tahun 2022. Realisasi belanja negara tahun 2022 mencapai Rp3.096,3 triliun atau 99,67 persen dari pagu APBN TA 2022, dan meningkat 11,12 persen dari realisasi belanja tahun 2021. Realisasi defisit anggaran tahun TA 2022 berada pada level 2,35 persen terhadap PDB, lebih rendah dari target APBN TA 2022 sebesar 4,69 persen PDB dan juga lebih kecil dibandingkan defisit tahun 2021 yaitu sebesar 4,57 persen dari PDB.

Yang Terhormat Pimpinan Sidang,

Keberhasilan Pemerintah menjaga rasio utang dibawah batas yang ditentukan undang-undang, yaitu 60% dari PDB, patut diapresiasi. Rasio utang pemerintah tahun 2022 sebesar 39,70% dari PDB, menurun sebesar 1,04% dari tahun 2021 yaitu sebesar 40,74% dari PDB. Namun, yang menjadi perhatian dan catatan adalah bahwa penurunan rasio utang tersebut bukanlah disebabkan oleh nilai utang yang semakin turun, tapi disebabkan oleh naiknya PDB tahun 2022 sebagai dampak perekonomian yang mulai bangkit dari pandemi. Oleh karena itu, **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** meminta Pemerintah agar selalu mewaspadaai nilai utang yang semakin meningkat ini.

Yang Terhormat Pimpinan Sidang,

Selanjutnya, kemajuan yang patut memperoleh perhatian dalam Tahun Anggaran 2022 adalah hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kemudian BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Audit Eksternal berada pada level *Advanced*. Namun, untuk kriteria Analisis Kestinambungan Fiskal Jangka Panjang, BPK RI menilai pada level *Basic*. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** meminta Pemerintah untuk segera mengindahkan catatan BPK terkait pemutahiran laporan analisis kesinambungan fiskal jangka panjang (*Long Term Fiscal Sustainability*). Sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, Laporan LTFS tersebut belum pernah dimutakhirkan. Selain itu, Pemerintah juga belum memiliki landasan hukum dalam penyusunan Laporan LTFS. Dalam hal ini, Pemerintah hanya

mempertimbangkan dampak demografi dalam melakukan analisis kesinambungan fiskal jangka panjang dan belum mempertimbangkan dampak perubahan terhadap volume dan nilai sumber daya alam yang secara signifikan memengaruhi postur APBN.

Yang Terhormat Pimpinan Sidang,

Terkait penerimaan negara yang bersumber dari pendapatan Sumber Daya Alam yang sifatnya mudah habis dan tidak stabil, pendapatan sumber daya alam harus dikelola secara transparan, sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal Pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal dapat berupa penghematan sebagian dari pendapatan sumber daya tahunan untuk tujuan stabilisasi dan generasi mendatang. Namun, sayangnya pada dokumen anggaran tidak terdapat alokasi khusus penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi pada pengelolaan sumber daya migas yang tidak terbarukan. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** meminta Pemerintah agar membuat Alokasi khusus penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi, mengingat cadangan minyak dan gas bumi Indonesia cenderung mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Cadangan terbukti minyak bumi (proven) tahun 2022 sebesar 2,27 miliar barel, sedangkan pada tahun 2018 cadangan minyak bumi terbukti (proven) sebesar 3,15 miliar barel. Penurunan juga terjadi pada cadangan gas bumi. Pada tahun 2022, cadangan gas bumi terbukti (proven) sebesar 36,34 triliun kaki kubik, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 96,1 triliun kaki kubik.

Yang Terhormat Pimpinan Sidang,

Terkait Dana Sumber Daya Alam dan tata kelolanya, mestinya ditetapkan dengan jelas, dengan pelaporan rutin, yang mencakup operasi dana, keuangan, dan kinerja investasinya. Namun, Berdasarkan LHR 2022 BPK RI dinyatakan bahwa Pemerintah tidak memiliki Dana Sumber Daya Alam. Selain itu, tidak terdapat SWF di Indonesia yang sumber pendanaannya dapat dikaitkan secara langsung dengan penerimaan SDA dan ditujukan untuk tujuan penghematan, stabilisasi fiskal, atau tujuan lainnya yang ditetapkan. Keseluruhan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi dimasukkan ke dalam APBN dan dialokasikan dalam belanja negara untuk membiayai program pembangunan secara umum.

Yang Terhormat Pimpinan Sidang,

Terkait pelaksanaan APBN TA 2022 secara keseluruhan, Fraksi kami menyampaikan beberapa catatan dan masukan sebagai berikut:

Pertama, Fraksi **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah karena pencapaian tersebut mencerminkan adanya kesungguhan dan komitmen pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam

menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan Standar Akuntansi Pemerintah. Guna mengoptimalkan kualitas LKPP sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** meminta Pemerintah untuk melakukan upaya efektif menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Kedua, kemampuan penyelenggara negara dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan Standar Akuntansi Pemerintah harus memberikan efek positif yang bisa mendorong pelaksanaan laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) memperoleh kemajuan serupa, sehingga mampu menghindari terjadinya kebocoran anggaran dan mendorong efektifitas serta efisiensi pemanfaatan anggaran daerah.

Ketiga, semua unsur pengelola keuangan Negara untuk bisa melakukan percepatan realisasi serapan anggaran agar berbagai program yang telah disusun dengan baik dapat terealisasi dengan baik. Anggaran terserap optimal, efektif, efisien, akuntabel, dan nyata *output, outcome* serta manfaatnya bagi masyarakat.

Keempat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta kepada pemerintah melakukan langkah langkah yang lebih efektif dan optimal dalam memanfaatkan sumber daya lembaga/instansi bagi perbaikan kualitas dan peranannya terutama aparat pengawasan internal melalui pembinaan dan pendampingan secara intensif dalam hal pengelolaan keuangan negara, mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

Yang Terhormat Pimpinan Sidang,

Selama Tahun Anggaran 2022, perekonomian global menunjukkan tren pemulihan yang ditandai dinamika kasus Covid-19 terus menurun sehingga menjadi sinyal pemulihan ekonomi global yang terlihat di beberapa negara sudah tumbuh positif termasuk negara kita. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 5,3%. Tren yang membaik dari tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,69 persen, dan jauh lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen.

Kondisi positif ini terus berlangsung hingga tahun 2023 dimana ekonomi berada dalam zona ekspansif, yang ditopang oleh tren membaiknya harga beberapa komoditas. Sejalan dengan pemulihan perekonomian global, perekonomian domestik menunjukkan prospek pemulihan ekonomi yang kuat dengan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, investasi, serta perdagangan internasional. Instrumen APBN perlu terus diperkuat untuk merespon dampak negatif yang muncul dari ketidakpastian global. Ekspektasi pemulihan ekonomi perlu terus didorong untuk mencapai target dan asumsi pada APBN 2023.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan RI beserta seluruh jajarannya,
Yang terhormat Saudara Anggota Dewan dan hadirin sekalian yang berbahagia,

Demikianlah beberapa pendapat kami terhadap RUU ini, selanjutnya dengan mengucapkan ***Bismillahirrohmanirrohim***, **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** menyatakan menyetujui Rancangan Undang Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022 untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Atas perhatian saudara pimpinan dan para anggota, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Bangsa Indonesia diberikan kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi berbagai masalah dan mampu mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin.

Wallahumuwaffiq Ilaa Aqwamith Thorieq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 24 Agustus 2023

PIMPINAN

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,


Dr. H. M. Amir Uskara, M. Kes


Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si

